

ISLAM DAN NEGARA

Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983

DISERTASI

Disertasi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Studi Islam



Oleh:

Indrawati

F03416056

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Indrawati, S.Sos., M.Kom.I.

NIM : F03416056

Program : Doktor (S3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Indrawati, S.Sos., M.Kom.I.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Indrawati ini telah disetujui untuk diuji pada
tanggal 31 Maret 2021

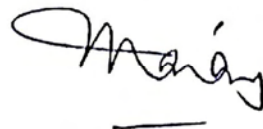
Oleh

Promotor I

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Prof. H. Syafiq A. Mughni, M.A., Ph. D.

Promotor II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masdar' with a horizontal line underneath.

Prof. H. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI
TAHAP TERTUTUP**

Disertasi ini telah melewati proses ujian tahap tertutup (pertama)
Pada hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua Penguji)



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fill.I (Sekretaris/Penguji)



Prof. H. A. syafiq Mughni, M.A., Ph.D. (Promotor I/Penguji)



Prof. H. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. (Promotor II/Penguji)



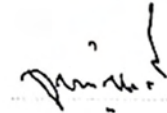
Prof. Dr. H. Muzamil Qomar, M.Ag. (Penguji Utama)



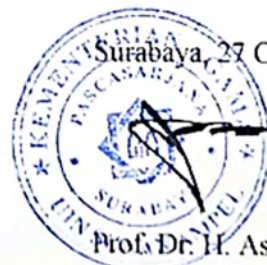
Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag (Penguji)



Dr. Phill. Khoirun Ni 'am (Penguji)



Surabaya, 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Indrawati, S.Sos., M.Kom.I.
NIM : F03416056
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : indrawati210275@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

ISLAM DAN NEGARA : GENEALOGI SEKULARISME ISLAM DI
INDONESIA 1930-1983

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 November 2021

Penulis

(Dr. INDRAWATI, M.KOM.I.)

V. BAB V. DISKURSUS SEKULARISME ISLAM PERIODE	
1965- 1983	212
A. Latar Belakang Sekularisme Islam Periode Orde Baru (1965-1983)	212
B. Praktik Diskursif Sekularisme Islam Periode Orde Baru (1965-1983)	214
C. Respons Intelektual Muda Islam	223
D. Ruang Publik	240
E. Permainan Kuasa: Konsolidasi dan Kontestasi	250
F. Sekularisme Islam Sekali lagi: Pancasila sebagai Asas Tunggal	253
G. Pergulatan Kuasa: Konsolidasi dan Kontestasi Politik Islam: Respon Aktivis Islam terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal	259
H. Komunitas Epistemik	262
I. Proposisi	263
VI. Bab VI. KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS SEKULARISME	
ISLAM DI INDONESIA (1930-1983)	266
A. Latar Belakang Pemikiran Sekularisme Islam di Indonesia (1930-1983)	266
B. Kontinuitas Sekularisme Islam di Indonesia (1930-1983)	270
C. Diskontinuitas Sekularisme Islam di Indonesia (1930-1983)	292
VII. Bab VII.	
PENUTUP	299
A. Kesimpulan	299
B. Implikasi Teoretis	301
C. Keterbatasan Studi	304
D. Rekomendasi	305
DAFTAR PUSTAKA	306
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

Literatur lain menyebutkan, misalnya Donald Eugene Smith menggunakan sekularisasi politik dengan istilah sekularisasi pemerintahan.³ Ia mencirikan sekularisasi pemerintahan dengan *pertama*, pemisahan pemerintahan dari ideologi-ideologi keagamaan dan struktur-struktur keagamaan, *kedua*, ekspansi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan dalam bidang sosial ekonomi yang semula ditangani struktur-struktur keagamaan, dan, *ketiga*, penilaian silang (*transvaluation*) atas kultur politik guna menekankan tujuan-tujuan dan alasan-alasan keduniaan yang tidak transenden, sarana-sarana yang pragmatis; itulah nilai-nilai politik sekular. Bagi Charles Taylor,⁴ sekularisasi politik merupakan mundurnya agama dari ruang publik, penyusutan agama dalam kehidupan masyarakat atau pemisahan gereja dan negara dalam wilayah publik.

Peniadaan agama dalam pengaturan negara pada masa menjelang kemerdekaan menjadi bahan perdebatan yang panjang antara kelompok Nasionalis yang diwakili yaitu Sukarno, termasuk di dalamnya ada intelektual muslim (Mohammad Hatta), sedangkan Kelompok Islam yang diwakili oleh K. H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan kawan-kawan.⁵ Perdebatan yang *alot* dan panjang kemudian diakhiri dengan kemenangan kelompok Nasionalis, melalui gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Sukarno pada sidang BPUPKI pada Juni 1945.⁶ Meskipun terdapat frase tujuh kata yang dikenal dengan Piagam Jakarta,

³ Donald Eugene Smith, *Agama di Tengah Sekularisasi Politik* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 91.

⁴ Charles Taylor, kata pengantar dalam bukunya *A Secular Age* (Crambridge, Mass: Harvard University Press, 2007), 1-22.

⁵ Untuk melihat tokoh-tokoh Nasionalis dan Islam siapa saja yang terlibat dalam dinamika perdebatan pada sidang BPUPKI lihat Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institution*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972), 34-41.

⁶ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), 33.

maupun praktis. Pada dimensi teoretis, *pertama*, studi ini diharapkan dapat mengelaborasi dan mengungkap terjadinya latar belakang lahirnya pemikiran sekularisasi politik Islam pada masing-masing periode. *Kedua*, diharapkan pula dapat mengelaborasi perkembangan pemikiran sekularisasi politik dari rentang waktu menjelang masa-masa kemerdekaan, yaitu sidang BPUPKI, sidang konstituante, sampai era pemberlakuan Pancasila asas tunggal. Dengan mengetahui praktik diskursif sekularisme Islam di Indonesia dari rentang waktu 1930-1983, akan diketahui bagaimana kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran tersebut, komunitas epistemik, blok historisitas dan tipologi sekularisme Islam di masing-masing periode.

Pada dimensi praktis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmiah mengenai diskursus sekularisme Islam, baik kontinuitas diakronik dan diskontinuitas sinkronik, komunitas epistemik, blok historis dan tipologi sekularisme Islam di Indonesia lewat pemikiran-pemikiran para tokoh di masing-masing periode yang terentang dari 1930 sampai dengan 1983.

E. Studi-Studi Terdahulu

Studi tentang pemikiran sekularisasi politik Islam telah diteliti baik dari para sarjana muslim Indonesia sendiri maupun sarjana asing. Di sini dikemukakan beberapa studi tentang, terutama yang berkaitan dengan pemikiran sekularisasi politik dan tema-tema lain yang relevan. *Pertama*, studi disertasi yang pernah dilakukan oleh Bachtiar Effendy yang kemudian dibukukan dengan judul Islam dan

Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Studi ini menfokuskan pada permasalahan mengenai tipe/jenis pemikiran dan praktik politik Islam yang dapat menjamin terbinanya hubungan yang baik antara Islam dan Negara di Indonesia.²¹ Studi ini salah satunya membahas tipe/jenis pemikiran yang *adaptable* dalam menjalin relasi yang baik antara Islam dan negara adalah pemikiran yang mengusung gagasan substansialistik Islam, salah satunya adalah pemikiran sekularisasi politik. Persamaannya studi disertasi Bachtiar Effendy dengan studi disertasi ini adalah sama-sama mengangkat topik tentang relasi Islam dan negara, namun perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya, jika studi disertasi Bachtiar Effendy fokus pada pemikiran politik kaum/kelompok Islam, namun disertasi ini justru mengkaji pemikiran sekularisme Islam dari kaum nasionalis atau kebangsaan yang beragama Islam.

Kedua, studi disertasi yang dilakukan oleh Greg Barton yang telah dibukukan dengan judul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*. Studi Barton ini menfokuskan pada kajian kebangkitan pemikiran Islam Neo-Modernis di Indonesia yang digagas oleh ke-4 tokoh di atas mulai dari rentang tahun 1960-1980. Persinggungan dengan pemikiran sekularisasi politik pada studi Barton adalah pada isi gagasan para tokoh di atas, terutama gagasan sekularisasi politik yang diusung oleh Nurcholish Madjid pada tahun 1970-an.²² Adapun persamaannya dengan studi ini adalah sama-sama mengkaji para

²¹ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 15.

²² Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Paramadina, 1999), 16.

<i>Islamisasi di Indonesia</i> (Bandung: Jalasutra, 2007).	
Ahmet Kuru. <i>Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey</i> (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).	Tipologi sekularisasi politik di Amerika Serikat bertipe sekularisme pasif, (<i>passive secularism</i>) dan Perancis dan Turki bertipologi sekularisme asertif/tegas (<i>assertive secularism</i>).
Listiyono Santoso. <i>Agama dan Negara Tinjauan Hermeneutika atas Konsep Sekularisasi Politik Menurut KH. Abdurrahman Wahid</i> . Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2003)	Sekularisasi politik dalam terminologi Abdurrahman Wahid adalah berusaha untuk mendudukan persoalan politik sebagai persoalan duniawi dan manusiawi, sehingga harus didekati dengan pendekatan yang sama, tanpa harus melibatkan agama di dalamnya.
Ahmad Nur Fuad, <i>Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual</i> , Disertasi, UIN Sunan Ampel, 2010	Terjadinya pergeseran sosial intelektual dalam Muhammadiyah pada periode kontemporer (sejak awal 1990-an), semula komunitas epistemik dan blok historis yang dominan adalah kelompok revivalis-ortodoks (ulama) bergeser ke kelompok liberal dan transformatif.

Dari ke sebelas kajian di atas, beberapa studi mengenai sekularisme Islam di Indonesia belum ada yang membahas dari pendekatan kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran, komunitas epistemik, blok historis dan tipologi sekularisme Islam melalui pemikiran para tokoh-tokohnya.

Meskipun berbeda dari studi-studi terdahulu, baik dari segi fokus penelitian, kerangka teoretis, dan metodologi yang digunakan, namun disertasi ini tetap berpijak di atas temuan-temuan atau tesis-tesis yang telah dihasilkan oleh studi-studi terdahulu.

kuasa sebagai permainan strategis antara pihak-pihak yang bebas dan merdeka inilah yang menjadi inti dari cara Foucault memahami kuasa secara umum.

Pada saat kuasa bergerak menjadi “dominasi”, perlawanan terhadap pihak kuasa tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan, hanya saja sangat terbatas dan jauh lebih susah untuk dilakukan. Dominasi sendiri mengacu pada relasi kuasa yang bergerak satu arah antara pemilik kuasa dengan pihak yang dikuasai, dengan demikian pihak-pihak yang dikuasai ini memiliki derajat kebebasan terbatas untuk melakukan perlawanan/penolakan.

Sehingga dapat dikalkulasi di bawah ini bahwa terdapat berbagai tipe kuasa yang dijalankan dalam suatu masyarakat, yaitu kuasa yang bertipe dominan dan kuasa yang bertipe setara/sejajar. Kuasa yang bertipe dominan banyak dipraktikkan pada pemerintahan yang otoritarian, sedangkan tipe kuasa sejajar/relasi dua arah banyak dipraktikkan pada pemerintahan yang demokratik.

Konsepsi Foucault mengenai kuasa di atas sangat membantu dalam menganalisis baik hubungannya antara pihak sesama pengusung wacana sekularisme Islam dalam masyarakat yang berdiri pada asumsi mereka adalah anggota masyarakat biasa, bukan orang dari pihak negara. Konsepsi kuasa sejajar/dua arah ini dapat digunakan untuk menganalisis permainan kuasa pada periode sekularisme Islam pertama (1930-1945) dan periode sekularisme Islam kedua (1945-1959), kedua periode ini terdapat permainan kuasa yang bersifat simetris, dua arah, timbal balik karena pihak partisipannya memiliki derajat kebebasan yang sama. Sedangkan tipe kuasa dominan sangat kompatibel untuk

toleransi kembar Alfred Stepan, disertasi ini mengkaji batas minimal kebebasan institusi agama mengatur institusi politik atau dengan kata lain batas minimal toleransi yang diberikan oleh institusi politik terhadap agama dalam mengatur dirinya.

Dalam perspektif ini, sekularisme Islam yang dihasilkan oleh intelektual muslim, sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi mereka dalam suatu sistem relasi sosial dan politik yang melibatkan berbagai kekuatan sejarah politik pada kurun waktu tertentu. Bertitik tolak dari perspektif di atas, penelitian ini menggunakan kerangka kontinuitas dan diskontinuitas untuk mengungkap adanya keberlanjutan dan pergeseran pemikiran serta tipologi sekularisme Islam.

H. Metode Penelitian

Sebagaimana dalam riset-riset lainnya, apabila data yang digunakan dalam suatu studi bersifat kualitatif, maka bisa dikatakan sebagai riset kualitatif, demikian juga studi disertasi ini. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai pendapat/opini para tokoh politik yang beragama Islam yang bertema sekularisme Islam. Sedangkan sumber data yang digunakan disertasi ini adalah sumber pustaka primer, baik yang bersumber dari risalah sidang BPUPKI dan risalah sidang konstituante. Selain dua sumber di atas, berarti menggunakan sumber data sekunder.

Adapun metode analisisnya menggunakan berbagai pendekatan yang kompatibel untuk menjawab masing-masing rumusan masalah dalam disertasi ini. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu latar belakang pemikiran sekularisme Islam pada masing-masing periode, maka metode analisisnya

dikategorisasikan berdasarkan variabel-variabel penelitian, yaitu variabel latar belakang sosial politik sekularisme Islam, kontinuitas dan diskontinuitas sekularisme Islam, dan tipologi sekularisme Islam di Indonesia. Relevansi data di atas dipertimbangkan berdasarkan keterkaitan tema tulisan dalam usaha peneliti menjawab pertanyaan penelitian disertasi ini, dan validasi sumber data tersebut dipertimbangkan berdasarkan isi tulisan tersebut merupakan hasil riset, berita, meskipun merupakan opini sepihak dari seseorang, sejauh tulisan tersebar luas di kalangan massa dan diafirmasi oleh publik, maka sumber data tersebut dianggap valid/kredibel (terpercaya).

Setelah pengumpulan data dan kondensasi data, maka tahap ketiga, adalah penyajian data (*data display*). Penyajian data merupakan usaha penyusunan informasi berdasarkan kategori-kategori penelitian, yaitu ragam pemikiran sekularisme Islam yang terbagi menjadi beberapa periode antara tahun 1930-1983, sehingga memungkinkan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Setelah dikondensasi kemudian dianalisis, dan disajikan dalam bentuk teks, Setelah itu tahap keempat, yaitu tahap akhir adalah penyimpulan (*conclusions drawing*), yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam usaha menempatkan kondisi-kondisi sinkronik dalam sebuah konteks diakronik, susunan penulisan studi ini didasarkan pada kronologi. Namun untuk menghadirkan suatu pendekatan interaktif, metode kronologis di atas dikombinasikan dengan penyusunan penulisan secara tematik. Dengan demikian bisa dicermati bahwa kronologi sekularisme Islam sambung-menyambung berdasarkan sub-sub topik dari setiap bab. Dengan kata lain, mengingat karena

sejak awal riset ini tentang sejarah panjang pemikiran sekularisme Islam, maka metode utama tetap menggunakan kronologis, sedangkan proses diakronik yang berkonsekuensi pada kesimpulan ideografis dan unik dan proses sinkronik yang berkonsekuensi pada kesimpulan nomotetik dan generik disatukan lewat jalinan koherensi/konsistensi tema utama yaitu sekularisme Islam.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis sosiologi pengetahuan yaitu konteks (*contextual analysis*) yang melatarbelakangi lahirnya sekularisme Islam tersebut, maka unit analisis berpusat pada situasi sosial politik yang menjadi faktor pendorong lahirnya pemikiran tersebut. Sebagaimana yang disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa suatu gagasan/pemikiran merupakan warisan dari peristiwa masa lalu dan merupakan hasil interaksi dengan situasi masa kini. Pendekatan ini bisa dikatakan sebagai pendekatan interaktif, artinya gerak sekularisme Islam di Indonesia merupakan hasil pergulatan dinamis antara masa sebelumnya dan masa berikutnya, termasuk juga memengaruhi antar beragam tradisi politik dan intelektual sekularisme Islam yang berbeda. Tujuan dari pendekatan ini ada dua, 1) untuk menumbuhkan kesadaran adanya situasi dan pemikiran masa lalu yang memengaruhi sekularisme Islam di Indonesia pada masa tertentu, 2) untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sekularisme Islam tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pihak lain, pihak yang memiliki pemikiran yang berseberangan dengan gagasan sekularisme Islam. Dengan memahami keberadaan pihak berseberangan, memudahkan pula memahami batasan-batasan sekularisme Islam dari para aktivis politik beragama Islam tersebut.

Untuk tujuan yang *pertama*, perhatian diberikan kepada faktor-faktor sosial politik yang mempengaruhi lahirnya sekularisme Islam baik pada masa pra-kemerdekaan (1930-1940), menjelang kemerdekaan yaitu di sidang BPUPKI, Panitia Sembilan dan Sidang PPKI (1945), Sidang Konstituante (1956-1959), pada masa Orde Lama (1959-1965) dan Orde Baru (1966 – 1983). Untuk tujuan yang *kedua*, perhatian diberikan kepada kelompok oposisi dari kelompok sekularisme Islam ini, yaitu kelompok Islam, yang memengaruhi secara langsung/tidak langsung sekularisme Islam di Indonesia, sehingga menghasilkan interrelasi dan ketegangan hubungan antar keduanya.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu menganalisis kontinuitas dan diskontinuitas sekularisme Islam di Indonesia (1930-1983), maka unit analisisnya adalah teks (*textual analysis*), dan hubungan antar-teks (*inter-textual analysis*). Analisis dilakukan untuk mengaitkan satu teks dengan teks yang lain agar diketahui relasi dan interrelasi serta kemungkinan adanya saling pengaruh-memengaruhi. Pengamatan terhadap teks dan hubungan antar teks bertitik tolak pada praktik diskursif sekularisme Islam Indonesia dalam rentang waktu 1930-1983, yang terbagi menjadi 4 periode, antara lain: periode pra kemerdekaan (1930-1945), periode pasca kemerdekaan (1945-1959), periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan periode Orde Baru (1965-1983).

Adapun praktik diskursif adalah proses produksi, distribusi, konsumsi teks sebagai instrumen/media/sarana penting dari pergulatan kuasa, perubahan sosial, dan konstruksi sosial. Pergulatan kuasa berlangsung baik di dalam maupun atas wacana. “Wacana (*discourse*) mentransformasikan dan memproduksi kuasa.

Dalam memahami praktik diskursif/wacana, perlu juga memperhatikan titik klimaks dari pertarungan kuasa yang terkandung dalam wacana tersebut. Titik klimaks ini biasa dikenal dengan istilah permainan-permainan kuasa (*power games*). Permainan-permainan kuasa mencerminkan dan memengaruhi konsolidasi dan kontestasi yang berlangsung dalam sederetan pergulatan kuasa baik dalam relasi-relasi antara negara dan masyarakat maupun dalam perbenturan-perbenturan di antara beragam kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat. Ada pun konsolidasi dalam pengertian kamusnya adalah usaha untuk memperteguh atau memperkuat antar berbagai orang, tokoh, kelompok, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengertian kontestasi adalah usaha memasarkan ide/wacana kepada khalayak/public dengan tujuan meraih dukungan, pengikut, pembela atas wacana tersebut. Permainan-permainan kuasa ini akhirnya melahirkan “monumen-monumen” (politik) historis tertentu dari setiap generasi pendukung ide sekularisme Islam itu sendiri. Monumen-monumen ini pada gilirannya akan menjadi pijakan dan standar bagi reproduksi dan reformulasi tradisi-tradisi sekularisme Islam di kalangan kaum sekuler yang beragama Islam di Indonesia.

Dalam upaya untuk menganalisis komunitas epistemik, maka unit analisis adalah versi pemikiran tertentu yang dianggap valid (absah) secara bersama-sama (*mind set*) yang muncul pada masing-masing periode. Oleh karena cakupan sekularisme Islam ini cukup luas, maka usaha melihat komunitas epistemik ditujukan pada pemikiran sekularisme dalam versi berbeda atau baru dengan versi pemikiran sekularisme sebelumnya. Demikian halnya dalam melihat blok historis,

Setamat dari *Technische Hogeschool* Bandung (kini Institut Teknologi Bandung) beliau menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sebaliknya pada tanggal 4 Juli 1927 bersama Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sunario, dan lain-lain. Beliau mendirikan PNI (Perserikatan Nasional Indonesia, kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia), sebagai gabungan dari organisasi-organisasi dan partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, di antaranya PNI, Partai Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Perserikatan Selebes, dan Kaum Betawi.

Karena kegiatan politiknya pada tahun 1930 Sukarno ditahan pemerintah kolonial dan kemudian dijatuhi hukuman empat tahun. Pidato pembelaannya di Landraad Bandung yang berjudul *Indonesia Menggugat* menggegerkan dunia Internasional, sehingga pemerintah kolonial pada tanggal 31 Desember 1931 terpaksa membebaskan Sukarno sebelum masa hukumannya selesai.²⁴ Sekeluarnya dari Penjara Sukamiskin ternyata kegiatan politiknya tidak berkurang. Bahkan beliau memutuskan masuk ke Partindo (Partai Indonesia), dan memimpin majalah partai yang radikal, *Fikiran Rakyat*.²⁵

Walaupun tidak diketahui latar belakang Islam dari pihak keluarga, namun terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Sukarno adalah muslim yang taat. Sebagaimana dalam artikel yang didapatkan oleh penulis bahwa ketika Sukarno diundang datang ke Uni Soviet pada tahun 1960-an, Perdana Menteri (PM) Soviet saat itu, Nikita Sergejevich Khrushchev lewat sambungan telepon, ia

²⁴ Bung Karno, *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial* (Jakarta: CV. Masco, Tanpa Tahun Terbit)

²⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 18.

Pulau Jawa, yaitu sekolah Dokter Hewan (Bogor). Karena tidak berminat, ia pindah ke sekolah pertanian namun tidak minat juga. Akhirnya pindah ke Surakarta (1926) masuk ke AMS (*Algemene Middelbare School*-setara dengan SMA). Di AMS, Yamin mengambil jurusan *Oostersch Letterkundige Afdeling* (budaya). Di jurusan tersebut, Yamin tertarik dengan mata pelajaran Sastra, Bahasa dan Budaya pada umumnya. Dan ia menjadi murid yang menonjol. Setelah tamat dari AMS, ia melanjutkan studinya ke Jakarta dan masuk Sekolah Tinggi Hukum pada tahun 1927. Dan ia menamatkannya pada tahun 1932, dan berhak menyandang gelar *meester in de rechten*, yang membuat Yamin akhirnya dikenal dengan nama Mr. Muhammad Yamin.

Selain latar belakang pendidikannya yang cukup baik, Yamin juga memiliki latar belakang sosial organisasi yang baik juga. Ia beserta Hatta merupakan salah satu pemimpin aktif di Jong Sumatera Bond. Mereka-lah yang menggerakkan gelora dan semangat kemerdekaan para pemuda Sumatera. Saat 1923, Lustrum Jong Sumatera Bond diadakan di Jakarta, lahirlah kesadaran perjuangan kemerdekaan yang tidak dibatasi lokal lagi, melainkan sudah nasional.

Dari gambaran riwayat pendidikan dan aktivitas organisasinya bisa dikatakan berlatar belakang sekuler, kalau boleh dikatakan demikian-sebagai antitesa dari pendidikan pesantren yang dikenal juga eksis dan terkenal di Sumatera, seperti Sumatra Thawalib salah satunya. Dengan riwayat dan gambaran kehidupan keluarganya demikian, maka wajar Muhammad Yamin merupakan salah satu penggagas dan pendukung sekularisme Islam, ia menjadi salah satu

penggagas dasar negara Indonesia, yang unsur-unsurnya hampir mirip dengan sila-sila dari Pancasila yang digagas Sukarno.

Demikian pula Soepomo yang lebih dikenal dengan Prof. Mr. Dr. Soepomo atau Mr. Soepomo merupakan orang yang dilahirkan dari keluarga bangsawan/priyayi di Sukoharjo, pada tanggal 22 Januari 1903. Kakek dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu, sedangkan kakek dari pihak Ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodo, Bupati Nayak Sragen. Oleh karena berasal dari keluarga priyayi, maka ia berkesempatan mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School), setingkat dengan sekolah dasar, di Boyolali pada tahun 1917. Di tahun 1920, Soepomo kemudian meneruskan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) yang terletak di kota Solo. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan hukum di Bataviasche Rechtschool di Batavia dan lulus pada tahun 1923. Setelah lulus, ia menjadi pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menteri Kehakiman di Indonesia ini kemudian meneruskan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden atau Leiden University di Belanda pada tahun 1924 di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, seorang profesor hukum dari Belanda yang terkenal sebagai perancang ilmu hukum adat Indonesia. Soepomo adalah seorang Islam, walaupun ia sendiri seorang Jawa tulen yang menganut ajaran Teosofi.³⁵

³⁵ Data tentang ke-Islam-annya diperoleh dari Merdeka. Com. Soepomo-Kisah Soepomo-Ahli Hukum sekaligus Menteri Kehakiman Pertama, <https://m.merdeka.com>, sedangkan ia seorang penganut Teosofi dari R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Lihat catatan kaki No. 42 (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 13-14.

mensyaratkan para pengikutnya untuk memahami doktrin-doktrin Islam (khususnya yang menyangkut masalah-masalah sosial) dalam cara yang melampaui penampilan-penampilan tekstualnya. Hanya lewat cara yang demikianlah umat Islam dapat menangkapnya. Hanya lewat cara yang demikianlah umat Islam dapat menangkap ‘roh” atau ‘api” Islam untuk menjawab tantangan-tantangan modernitas dan dunia yang terus berubah.

Pendapat Sukarno ini bukannya tanpa alasan, Sukarno khawatir bahwa cita-cita Nasional kemerdekaan Indonesia akan terhalangi dengan adanya pandangan yang menginginkan Islam harus menjadi landasan/pondasi dalam mengatur negara. Kekhawatiran ini menjadi logis karena kubu di seberang sana, yaitu kaum golongan yang disebut Sukarno sebagai golongan Islam memiliki pendirian yang berseberangan.

Pada era ini, kaum sekular ini (Sukarno dan Mohammad Hatta) berusaha mengonfrontrasi posisi/pemahaman ideologis para pemimpin dan aktivis Islam politik, terutama dalam soal hubungan antara agama (Islam) dan negara, mengingat Serikat Islam pada waktu itu merupakan organisasi yang memiliki massa paling besar dibandingkan massa dari organisasi lain.⁵⁸ Untuk menggambarkan betapa besarnya massa Serikat Islam dapat diindikasikan lewat pengadaaan pertemuan terbuka (*openbare vergadering*) yang diadakan di Surabaya jumlah massa yang hadir sebanyak 80.000 orang.⁵⁹ Pertemuan di Surabaya itu

⁵⁸ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 70.

⁵⁹ Sartono Kartodirdjo, *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975), 274

Adapun kelompok Sekularisme Islam memperjuangkan pemisahan negara dan agama dan pandangan nasionalisme sebagai jalan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan menyebutkan dirinya sebagai *kaum kebangsaan*, sebutan ini sebagai lawan dari lawan mereka yang disebut oleh Sukarno sebagai *kaum Islam*. Meskipun diakui bahwa penyebutan kaum kebangsaan dan *out group* mereka kaum Islam, bukan berarti mereka bukanlah Islam. Sukarno dan Hatta mereka juga tak kalah Islam-nya dibandingkan lawan seberangnya, seperti Natsir, Agus Salim, dan A. Hassan.

Mereka yang disebut sebagai kaum kebangsaan konsisten memperjuangkan pemisahan agama dan negara, dengan pendasaran-pendasaran rasional yang mereka sebutkan di atas. Mereka mengkhawatirkan bahwa agama akan menjadi alat pembenar untuk mengukuhkan kekuasaan yang bisa jatuh pada kesewenangan. Untuk itu agama perlu dikembalikan pada urusan agama, sedangkan politik dikembalikan pada politik.

Pada dasarnya polemik Sukarno, Hatta vis a vis Natsir, Agus Salim, dan Ahmad Hassan masih pada tataran eksploratif. Dua kubu masing-masing berkontribusi dalam mengedukasi hasrat masyarakat Hindia Belanda untuk merdeka dengan caranya masing-masing. Namun perlu disadari argumen pemisahan negara-agama dan Nasionalisme Sukarno-Hatta berpijak pada pendasaran karakteristik masyarakat Hindia Belanda yang plural, majemuk, atau heterogen. Heterogenitas masyarakat yang dikemudian hari dikenal sebagai bangsa Indonesia ini menjadi argumen kunci untuk menolak format negara berdasarkan nilai Islam. Walaupun sebesar apapun kontribusi organisasi Islam

sekuler dengan negara Islam. Komposisi Panitia Sembilan, antara lain Sukarno sebagai ketuanya, dan delapan anggota lainnya adalah Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, dan Maramis merupakan dari kelompok sekuler/kebangsaan, sedangkan Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasjim, dan Abikusno Tjokrosujoso merupakan wakil dari kelompok Islam. Panitia kecil ini akhirnya menyepakati satu rumusan yang dikenal kemudian dengan “Piagam Jakarta” atau ‘Jakarta Charter”, yang rencananya nanti dimasukkan dalam Pembukaan UUD.

Kompromi ini dihasilkan dengan kesepakatan bahwa Islam tidak dijadikan dasar negara, namun kompromi tersebut dalam bentuk antara lain: sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang semula diletakkan di urutan terakhir akhirnya diubah menjadi urutan pertama, dan ditambahi frase yang dikenal dengan tujuh kata, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kemudian ketika sesi kedua dilakukan, hasil rumusan Piagam Jakarta tersebut menjadi bahan kritikan pertama kali oleh J. Latuharhary yaitu tokoh yang mewakili kelompok Kristen Maluku serta beberapa wakil kelompok non Muslim dan tokoh sekuler lainnya. Mereka keberatan dengan frase “tujuh kata” tersebut, karena bisa melahirkan kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul saat diimplementasikan, satu sisi ada hukum Islam dan satu sisi hukum negara. Keberatan-keberatan di atas melahirkan perdebatan-perdebatan tak berujung yang hanya dapat dihentikan dengan kharisma Sukarno.

Mengapa harus *nation-state*? Mengapa harus Republik? Para *Founding Father* kita ternyata sangat memperhatikan isu yang mendunia saat itu, yaitu situasi global yang muncul pada saat itu yaitu abad 20, muncul berbagai macam gagasan negara modern dalam bentuk *nation-state* yang pertama kali dicontohkan oleh negara Islam di Eropa, yaitu Turki pada masa pemerintahan Kemal Attaturk. Seorang Jenderal Perang Turki yang akhirnya memodernisasi perpolitikan Turki, dengan cara menghapus sistem kerajaan.

Sebenarnya merupakan bagian dari usaha mereka meraih kemerdekaan dengan cara menyatukan berbagai unsur-unsur yang beragam/berbeda baik dari aspek lokal, suku, agama, dan budaya. Usaha pencapaian kemerdekaan tersebut tidak akan diraih tanpa menyatukan satu pandangan dari berbagai unsur tersebut. Disadari oleh mereka sebagai sesama suku bangsa yang senasib seperjuangan, mereka baru bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan jika mau dan berkehendak menjadi satu, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Tanpa persatuan, suku bangsa, para umat agama tertentu, daerah, atau satuan kekuasaan tertentu akan mudah dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan kolonial tersebut.

Namun jalan untuk menuju ke arah kemerdekaan lewat persatuan dari berbagai identitas sosial terbentur pada kenyataan, yaitu pada golongan tertentu yaitu golongan Islam menginginkan bahwa agar negara yang akan baru merdeka itu haruslah berbentuk negara Islam, dan dasar negaranya haruslah Islam, oleh karena itu harus ada penyatuan antara agama dan negara. Kelompok Islam dalam hal ini diwakili oleh pandangan Natsir bahwa nasionalisme Indonesia harus

sebagai dasar negara dengan syarat sila Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi sila pertama, dan penambahan pada sila tersebut tujuh kata, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, sehingga sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Mahaesa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.” Walaupun sehari kemudian, tujuh kata tersebut dihapuskan.

Bagi kaum Agama/Islam, keberadaan sila pertama ini dengan kata-kata Yang Mahaesa, menunjukkan simbolisasi tauhid, sehingga walaupun dasar negara jelas-jelas tidak menggunakan Islam, tetapi istilah *Esa* telah merepresentasi kepentingan mereka akan pentingnya Islam mewarnai negara yang baru merdeka tersebut.

Atas dasar asumsi sekularisme Islam kaum Islam pada studi ini bermakna sekularisasi pemisahan agama dan negara secara formal, maka penggunaan dasar negara yaitu Pancasila masih masuk dalam ranah sekularisme Islam.

G. Ruang Publik

Ruang publik yang dimaksud adalah wahana, media, sarana yang menyediakan pemikiran-pemikiran tersebut teraktualisasikan, terkontestasikan atau disajikan secara sengaja, langsung atau tidak langsung, sederajat sehingga memungkinkan tiap partisipan menyampaikan gagasannya secara terbuka sehingga mampu mempengaruhi partisipan satu dengan partisipan yang lain. Sebagai akibat dari adanya ruang publik tersebut, maka terciptalah identitas

hambatan media apa pun, mereka dipilih berdiri di forum tersebut sebagai perwakilan dari golongan masing-masing, baik dari golongan yang mewakili agama, mewakili aliran ideologi tertentu, gerakan sosial dan politik tertentu, dan lain-lain.

H. Permainan Kuasa: Konsolidasi dan Kontestasi

Wacana dan ruang publik adalah tempat perjuangan kuasa dikontestasikan, termasuk pula tempat identitas dan komunitas dikonstruksi. Daya dorong utama bagi berlangsungnya kuasa dan konstruksi identitas dan komunitas bagi kalangan sekularisme Islam kaum Islam di Indonesia adalah keinginan untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdiri pada kerangka model negara yang modern. Kerangka negara yang modern merupakan antitesa pada kerangka negara yang tradisional seperti kerajaan, ataupun sejenisnya. Dengan menggunakan negara modern yang terdiri dari kepala negara dalam bentuk negara republik (negara yang dipimpin oleh rakyat) dan sejenisnya.

Keinginan yang kuat sebagaimana di atas dimungkinkan dan juga dibatasi oleh struktur peluang politik yang ada, baik yang bersumber dari pengaruh eksternal, dan juga dinamika internal kaum muslim yang menggagas sekularisme Islam itu sendiri.

Sebagaimana yang disinggung dalam tulisan sebelumnya, Sekularisme Islam digelar dalam ruang publik yang formal, yakni dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada periode Mei - Agustus 1945. Kontestasi tersebut dimungkinkan karena adanya pengaruh eksternal yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik

Indonesia beragama Islam, sebagian besar darinya tidak terlalu taat dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam dan karena itu, mereka lebih cocok dengan negara “sekuler” ketimbang dengan negara Islam.¹⁴⁸

Dan terbukti dalam sidang BPUPKI, wacana sekularisme Islam yaitu dasar negara Indonesia haruslah lima sila (Pancasila) sebagaimana yang kita kenal selama ini menjadi wacana yang paling berpengaruh dan mendapat sambutan luar biasa pada momentum sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Walaupun tidak-atau belum-diambil keputusan mengenai dasar negara, namun pidato Ir. Sukarno tanggal 1 Juni 1945 mempunyai arti penting, bukan saja karena dapat mengintegrasikan seluruh pandangan para anggota BPUPKI menjadi suatu kesatuan yang utuh, tetapi juga karena disampaikan dengan retorika yang kuat. Pidato Ir. Sukarno tersebut mendapat sambutan secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI.¹⁴⁹

Di sisi lain, wacana dasar negara Indonesia haruslah Islam hanya diwakili oleh satu orang yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Meskipun yang mewacanakan Islam sebagai dasar negara hanya satu orang, namun kelompok Islam yang berjumlah 10 orang tersebut mampu menekan kelompok kebangsaan untuk memperhitungkan keberadaan/pandangan mereka. Hal ini terbukti bahwa Sukarno pun berinisiatif mengumpulkan sekitar 38 anggota panitia tersebut di kantor pusat Djawa Hokokai pada tanggal 22 Juni 1945 untuk membahas isu-isu yang belum selesai. Dari pertemuan tersebut maka dibentuklah Panitia Sembilan diketuai Sukarno untuk

¹⁴⁸ C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam* (Den Haag: The Hague University, Martinus Nijhoff, 1981), 45-46.

¹⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, xxxiii.

satu bangsa yang terjajah mulai bangkit dan menginginkan merdeka. Kembali kepada gagasan nasionalisme yang dipelopori para intelektual berpendidikan Barat adalah nasionalisme Hindia (dari Indische Partij) dan nasionalisme Jawa (Djawi Hisworo). Dan atas dasar nasionalisme Jawa inilah, Sutomo berpendapat bahwa Partai Sarekat Islam hanyalah alat yang digunakan oleh orang asing (bukan Jawa yaitu Agus Salim) yang masuk ke pergerakan nasional dengan tujuan memecah belah persatuan. Kemudian karena nasionalisme dengan cita rasa Jawa inilah Majalah Timbul (milik orang nasionalis Jawa, yaitu Wediodiningrat dan Singgih) menuduh Sarekat Islam telah keluar dari haluannya, yaitu telah mengorbankan kepentingan sosial ekonomi rakyat dengan kepentingan agama (Pan Islam) dan menuduh Agus Salim sebagai orang Arab yang memecah belah persatuan bangsa.

Kedua, oleh karena tuduhan yang ditimbulkan oleh Sutomo dan Majalah Timbul itulah muncul perselisihan Sarekat Islam dengan organisasi pimpinan kalangan nasionalisme Jawa seperti Surabaya Studie Club pimpinan Sutomo. Perselisihan akhirnya tidak hanya terjadi antara Sarekat Islam dengan Surabaya Studi Club, tetapi juga Sarekat Islam dengan Bandung Studie Club, sehingga bisa dikatakan bahwa Sarekat Islam telah banyak memutuskan hubungan pada berbagai organisasi nasionalisme non Islam. Terlebih-lebih antara Sarekat Islam dan PNI (pimpinan Sukarno) memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan persatuan. Bagi Sukiman sebagai perwakilan Sarekat Islam, persatuan hanyalah sebuah jalan/media untuk meraih tujuan yaitu kemerdekaan, sehingga meskipun gerak jalan perjuangan berbeda, maka tidak ada masalah. Namun bagi

Sukarno tidaklah demikian, persatuan memang sebuah jalan sekaligus tujuan, hanya itu Indonesia akan merdeka.

Karena perkembangan relasi yang tidak baik dan perbedaan pandangan mengenai persatuan, maka perbedaan pun berlanjut dengan munculnya perang opini antara Sukarno vs Natsir, Agus Salim dan A. Hassan. Pertama kali dipicu oleh pendapat Sukarno mengenai pentingnya mencintai tanah air dan bersedia mengabdikan diri pada tanah air sebagai syarat untuk menghidupkan persatuan dalam menggapai kemerdekaan. Di sinilah awal kali muncul sekularisme Islam tersebut. Bagi Sukarno persatuan hanya diwujudkan bila orang Indonesia mencintai tanah air dan mengabdikan dirinya pada tanah air, dan bukan agama atau selainnya. Namun berbeda dengan pendapat Agus Salim, Natsir dan A. Hassan, mengangkat tanah air sedemikian rupa hanyalah membuat Tanah air bagaikan sesembahan belaka saja, dan yang mengikuti pemahaman ini akan jatuh sebagai penyembah berhala. Pada titik point inilah perdebatan mengenai sekularisme Islam dimulai. Begitu Sukarno melalui tulisannya menghimbau pentingnya mencintai dan mengabdikan diri pada tanah air, dan bagi tokoh Islam seperti Natsir dan Agus Salim, hal tersebut merupakan satu bentuk kesyirikan maka pada saat itu perang opini mengenai sekularisme Islam pun dimulai. Para tokoh Islam pun menerangkan dengan panjang lebar mengenai watak Islam yang holistik, sedangkan Sukarno terang-terangan mengangkat bahwa politik tidak boleh diintervensi oleh agama mana pun yang menjadi representasi pemikiran satu kelompok tertentu.

Bahkan karena pendapat mengenai holistik Islam tersebut, memaksa Sukarno untuk mengemukakan opini berikutnya tentang pentingnya pemisahan agama dan negara, pentingnya memahami Islam dari substansinya, dan mengangkat keberhasilan Kemal Attaturk dalam memodernisasi Turki dengan prinsip-prinsip sekularisme Islam.

Polemik keduanya berlangsung pada tahun 1930 hingga kemerdekaan menunjukkan dominasinya. Kekuatannya tidak hanya bersumber dari latar belakang pendidikan tinggi dan pendidikan Barat, tetapi juga peluang politik yang bersumber dari pemerintah kolonial Jepang mempercayakan kepada kaum kebangsaan untuk mengambil alih kekuasaan pasca Jepang mengalami kekalahan Perang Dunia I. Hal ini menjadikan Kaum Kebangsaan mendesak agenda sekularisme Islamnya menjadi semakin kuat.

Desakan sekularisme Islam mendapatkan momentumnya di Sidang BPUPKI, yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam proses menetapkan sebagai dasar negara ini, batas toleransi minimum institusi politik dalam memberi ruang kebebasan institusi agama mengatur norma politik sudah nampak terlihat indikasi-indikasinya. Pada sidang tersebut, perang opini mengenai pemisahan agama dan negara tetap berlanjut, terutama saat berdebat mengenai dasar negara apa yang akan dipilih ketika Indonesia merdeka. Perdebatan cukup panjang dan ketat, yang akhirnya saat pidato Sukarno 1 Juni mengenai Pancasila, banyak peserta sidang secara aklamasi memilih Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila diterima secara aklamasi, namun penerimaan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah tidak bulat, sehingga

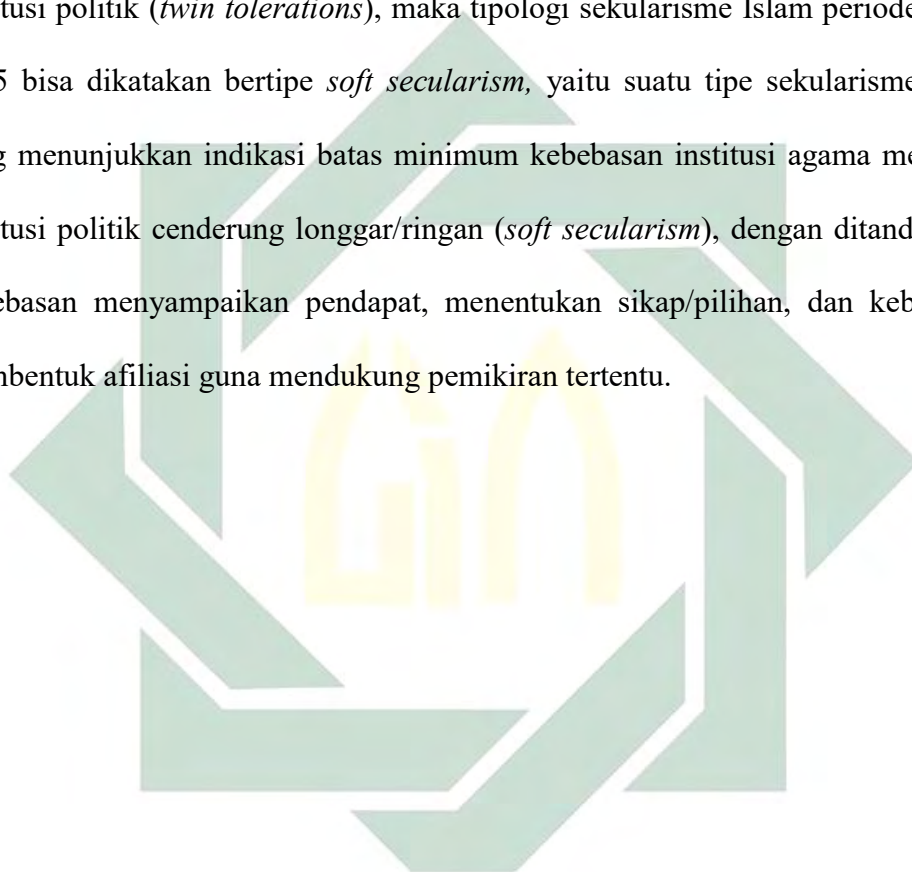
memaksa Sukarno mengadakan usaha-usaha kompromi dengan cara membentuk Panitia Sembilan untuk mengakomodasi keinginan-keinginan kaum Islam yang tidak bulat dalam menerima Pancasila. Kompromi tersebut berhasil, sehingga menghasilkan beberapa perubahan signifikan yang menguntungkan bagi kelompok Islam, mereka berhasil mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa awalnya sila kelima menjadi sila pertama dengan tambahan tujuh kata pada sila tersebut.

Ketiga, berdasarkan tiga indikator teori Toleransi Kembar Stepan, yakni:

1) derajat kebebasan untuk memberikan suara, pendapat dalam suatu masalah politik tertentu, 2) derajat kebebasan untuk memilih dan menolak suatu pemikiran politik dan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang terpilih, 3) derajat kebebasan untuk membentuk aliansi, organisasi yang bertujuan membentuk dukungan dalam rangka mempengaruhi suatu keputusan politik tertentu, maka bisa disimpulkan tipe sekularisme Islam pada periode ini adalah *soft secularism*. Dengan 3 indikator tersebut dijumpai sebagai berikut: kelompok nasionalis Islam memiliki kebebasan turut serta mengatur konstitusi politik, yakni saat penyusunan pembukaan UUD 1945, terdapat teks yang berbunyi atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan usulan pada pasal 6 yang mengatur kriteria Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam, termasuk pasal 29 ayat 1, Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam proses politik di atas, menunjukkan bahwa batas minimum toleransi yang diberikan oleh institusi politik terhadap institusi agama untuk mengatur konstitusi politik

sangatlah besar, sehingga bisa dikatakan telah terjadi *soft secularism* (sekularisme dalam versi ringan).

Dengan menggunakan perangkat analisis Stepan yang mendasarkan diri pada analisis batas minimal kebebasan bertindak institusi agama mengatur institusi politik (*twin tolerations*), maka tipologi sekularisme Islam periode 1930-1945 bisa dikatakan bertipe *soft secularism*, yaitu suatu tipe sekularisme Islam yang menunjukkan indikasi batas minimum kebebasan institusi agama mengatur institusi politik cenderung longgar/ringan (*soft secularism*), dengan ditandai oleh kebebasan menyampaikan pendapat, menentukan sikap/pilihan, dan kebebasan membentuk afiliasi guna mendukung pemikiran tertentu.



Syarifuddin dan Sutan Syahrir, namun pada tahun 1947 mereka pecah, Sutan Syahrir mendirikan PSI, sedangkan yang bergabung dengan pengikut Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR), 3) Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, dan beberapa partai kecil lainnya, 4) kemudian pada Januari 1946, PNI dihidupkan kembali dengan format yang berbeda dengan PNI partai negara yang dibubarkan tersebut. Meskipun Sukarno tidak menjabat sebagai ketua, tetapi para pengikut Sukarno yang memimpin partai ini, dan banyak lainnya.

Berikut ini konflik-konflik politik yang mengikutinya dibarengi pula peristiwa Agresi Belanda I dan II (1947 dan 1948-1949), sehingga pemilu yang semula dijanjikan oleh Kabinet Syahrir tahun 1946 terpaksa ditunda. Setelah Agresi Belanda berakhir, segera demokrasi parlementer Mohammad Natsir dari Masyumi (September 1950-April 1951), Kabinet Wilopo dari PNI (April 1952-Juni 1953) Kabinet Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi (1951-1952), Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari PNI (Juli 1953-Juli 1955), dan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi (Agustus 1955 - Maret 1956).

Melihat betapa pendeknya durasi kepemimpinan masing-masing kabinet, maka dapat dikatakan pada saat itu adalah era instabilitas politik yang akhirnya memengaruhi ketidakpuasan daerah atas kinerja pemerintahan pada masa itu. Sehingga melahirkan memunculkan berbagai gerakan separatis daerah yang merupakan respons dari ketidakpuasan daerah atas kinerja pemerintah. Situasi inilah yang kemudian mempengaruhi diskursus sekularisme Islam Islam selanjutnya.

Rekapitulasi situasi tersebut antara lain, antara lain: a) *faktor internal* yang memengaruhi suasana selama periode ini adalah perkembangan kekuatan-kekuatan politik

sering direfleksikan sebagai perang ideologi, yaitu peperangan antara pihak ideologi fasis dan otoriter, kemudian di pihak lain, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang berideologi liberal dan demokratis.

Akan tetapi, kondisi yang khas Indonesia juga memainkan peranan dalam menghasilkan definisi dasar negara yang bersifat ideologis. Nasionalisme Asia merupakan fakta yang berkembang sejak awal abad ini – kemenangan Jepang atas Rusia dan keberhasilan Sun Yat Sen di Cina – yang pada masa pendudukan Jepang dengan sadar dipakai sebagai alat mobilisasi massa melawan kekuasaan Barat. Ini menjelaskan mengapa sejumlah pemimpin Indonesia, di antaranya pemimpin yang terkemuka: Sukarno, dan pemikir politik Indonesia seperti Soepomo, mengembangkan wawasan yang lebih berpihak kepada falsafah negara Jepang ini membantu mereka dalam usaha merumuskan apa yang dianggap sebagai pandangan mengenai negara dan masyarakat yang khas Indonesia, yang bertolak belakang dengan paham-paham politik Barat yang diasosiasikan dengan kolonialisme.

Selama revolusi fisik/masa-masa instabilitas politik, Pancasila akhirnya perlahan-lahan dikembangkan menjadi doktrin, dengan menghubungkan kelima asasnya satu sama lain, dan merumuskan legitimasi sejarah dan sosialnya. Tetapi, dalam kampanye menjelang pemilu 1955 sejumlah partai politik secara eksplisit dan terbuka menyatakan keterikatan mereka pada ideologi yang berbeda-beda: Islam, Nasionalis (Pancasila), dan Sosialis. Pada sekitar waktu yang sama diadakan berbagai seminar dan musyawarah mengenai Islam dan Pancasila sebagai dasar negara.

B. Praktik Diskursif Sekularisasi Politik Islam pada Sidang Konstituante dan Pembentukan Blok Historis

Di era tahun 1930-an, gagasan sekularisasi berpusat pada wacana *pemisahan antara agama dan negara* yang selama ini paling intens diwacanakan oleh Sukarno, yang akhirnya memantik polemik/perang opini antara Sukarno dengan Natsir dan Agus Salim di pihak lain melalui media massa. Gagasan sekularisasi politik ini memiliki kekuatan pengaruh yang tinggi karena berhasil mendapatkan dukungan dari kalangan intelektual lainnya, yaitu Hatta.

Kemudian, dilanjutkan pada periode berikutnya, yakni sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI dan PPKI), gagasan sekularisme Islam kemudian berpusat pada gagasan mengenai bentuk negara Indonesia yang tepat yaitu Negara Kebangsaan atau *Nasion-State* atau Negara Persatuan, dan bukan negara Islam. Pendukungnya juga tidak main-main, yakni Sukarno sendiri, Muhammad Hatta (Hatta), Muhammad Yamin (Yamin), dan Soepomo. Dan yang terpenting pada periode ini, lahir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dapat mempersatukan berbagai suku bangsa, agama, dan aliran apa pun. Kelahiran Pancasila merupakan bentuk penandaan gagasan sekularisasi politik Islam terpenting karena pada periode berikutnya Pancasila terus mewarnai periode-periode wacana sekularisasi politik Islam berikutnya.

Pada periode ketiga ini, lewat sidang konstituante, wacana sekularisasi politik masih berpusat pada dasar negara, namun periode ini bisa dikatakan sebagai sebagai titik penting penandaan de-ideologisasi Islam karena harapan golongan Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara lewat jalur

konstitusional/sidang kontituante pupus karena Dekrit Presiden 1959, dan bahkan dalam periode pemerintahan selanjutnya.

Kehendak untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ini dan berupaya menghalangi kehendak kaum Islam mengganti/menggeser Pancasila sebagai dasar negara dengan Islam telah menyatukan berbagai pihak. Pihak-pihak ini merupakan barisan/komunitas imajiner yang mengharuskan mereka menemukan kode baru sebagai pedoman bergerak bersama-sama menyatukan posisi-posisi subjek yang beragam ke dalam apa yang disebut Gramsci sebagai suatu “Historis Blok,” yaitu komunitas epistemik yang lahir dari berbagai kalangan lapisan sosial ekonomi dengan berbagai profesi (ilmuwan, sastrawan, wartawan, ahli hukum, dan lain-lain), dan dari berbagai organisasi dan aliran politik, agama, suku bangsa yang akhirnya menyatukan mereka dalam satu kehendak yaitu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan menolak Islam sebagai dasar negara.

1. Partai-partai Politik Nasionalis Menuju Pembentukan Sebuah Blok Historis

Penyatuan kehendak politik dapat kita tangkap dari proses sidang konsituante. Sidang konstituante sejatinya diadakan dalam rangka merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) yang lebih rinci dan permanen daripada UUD sebelumnya (UUD 1945 dan UUDS 1950). Dalam kurun waktu tahun 1950 - 1959, merupakan periode konstitusi UUDS 1950. Memang Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, termasuk UUD 1950 tersebut masih

Islam, namun wacana tersebut telah bergulir, menggelinding, dan memasuki alam berpikir kaum intelek dan rakyat Indonesia. Sepedas apapun kecaman para pemimpin kaum Islam akan sikap Presiden Sukarno yang dianggap separatis, sepihak, membela satu golongan, mereka (pemimpin Islam) tetap tidak dapat menarik kembali wacana yang telah digulirkan oleh Sang Presiden.

Kedua, keunggulan dari para kedua pemimpin nasional tersebut, terutama Sukarno ada pada kepribadiannya yang kharismatis dan kemampuan orasinya yang kuat dan agitatif mampu memberikan pengaruh kuat atas penanaman wacana Pancasila sebagai ideologi/dasar negara Indonesia. Dampaknya cukup signifikan, arus dukungan Pancasila sebagai dasar negara bertambah kuat. Hal ini dibuktikan bahwa anggota konstituante yang berdiri di barisan pendukung Pancasila sebagai dasar negara lebih banyak dan komposisi pendukungnya juga tidak main-main. Kita lihat anggota-anggotanya antara lain Nur Sutan Iskandar sebagai tokoh sastrawan nasional yang karya-karyanya diakui menjadi salah satu pendukung barisan ini. Kemudian juga bisa disebutkan Roeslan Abdulgani, seorang wartawan senior dan sekaligus juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam kabinet Ali Sastroamidjyo.

Ketiga, jumlah anggota sidang Konstituante itu sendiri menunjukkan dari kalangan partai Nasionalis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota sidang dari kalangan pendukung Islam. Meskipun selisihnya tidak signifikan namun faktor ini bisa membuat posisi kelompok Nasionalis jelas lebih unggul daripada kelompok Islam. Bahkan jika diurai komposisi pendukung Pancasila sebagai dasar negara, di dalamnya terdapat tokoh yang dalam menyusun argumen

Dan terakhir, *kelima*, argumen kelompok pendukung Islam sebagai dasar negara tidak mampu berkembang lebih jauh, kelompok ini hanya berdiri pada seputar bahwa Islam agama sempurna yang telah menyediakan nilai-nilai holistik yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam argumennya ini, kelompok Islam tidak sadar/belum sepenuhnya memahami bahwa meskipun diakui keholistikan nilai-nilai Islam, namun harus diakui bahwa Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan hukum Islam tidak menyediakan aturan teknis berkaitan dengan cara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga membutuhkan tugas yang tidak mudah untuk menurunkan konsep-konsep umum Al-Qur'an ke konsep-konsep teknis yang dapat diterima oleh semua pihak/golongan. Meskipun dalam hal ini Pancasila juga memiliki kedudukan yang sama dengan Islam, sama-sama berwujud nilai-nilai umum, namun sekali lagi diakui Pancasila memiliki posisi yang unggul sebagai wacana dominan pada masa itu. Satu-satunya yang mampu membuat kelompok Islam bertahan dengan sikapnya adalah kekhawatiran kekuatan politik komunis yang berdiri di belakang Pancasila.

Melalui peluang-peluang politik demikian, kubu Blok Pancasila akhirnya bersikap defensif, mempertahankan mati-matian, bahkan bila perlu tidak perlu membahas ulang dasar negara karena persoalan sudah selesai, sehingga konstituante perlu fokus membahas konstitusi yang permanen untuk Republik Indonesia. Sebagaimana diutarakan oleh Suwirjo bahwa tugas konstituante adalah membuat undang-undang dasar bagi negara yang sudah berdiri, yakni UUD bagi

kecuali apabila ketua menganggap perlu menutupnya, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 20 orang anggota. Semua keputusan, kecuali yang dibuat dalam sidang tertutup, harus diambil secara terbuka.

Kedua, Kepemimpinan Konstituante, dipimpin oleh ketua dengan lima orang wakil ketua. Mereka dipilih dari anggota Konstituante dalam rapat terbuka yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante dan disahkan oleh Presiden. Sebelum pemilihan dan pengesahan ketua, sidang akan diketuai oleh anggota yang tertua. Adapun pemimpin konstituante diambil dari perwakilan berbagai faksi yang ada, antara lain: Wilopo (PNI) dipilih sebagai ketua/pimpinan Konstituante, sedangkan Prawoto Mangkusumo (Masyumi), Fatchurahman Kafrawi (NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI), dan Hidajat Ratu Aminah (IPKI), dipilih sebagai wakil-wakil ketua.

Ketiga, Panitia Persiapan Konstitusi, panitia ini mewakili semua golongan dan aliran pemikiran yang terdapat di dalam Konstituante. Panitia tersebut dibentuk menurut peraturan-peraturan antara lain, tiap golongan yang mempunyai satu hingga tiga orang anggota berhak menunjuk seorang wakil, setiap golongan yang mempunyai empat hingga enam anggota berhak menunjuk dua orang wakil, dan seterusnya.

Keempat, Panitia Persiapan Konstitusi diberi wewenang untuk membentuk komisi-komisi konstitusi dari para anggota-anggotanya, dengan tugas-tugas tertentu menurut peraturan yang ditentukan oleh panitia dan disahkan oleh sidang Pleno Konstituante. Jumlah komisi seperti ini tidak ditentukan, komisi-komisi

tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Setiap komisi konstitusi terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang anggota yang mewakili berbagai aliran pemikiran atau golongan dan dari mereka dipilih seorang ketua serta seorang juru bicara.

Kelima, Panitia Musyawarah. Panitia Musyawarah terdiri atas ketua Konstituante (sebagai anggota sekaligus ketua panitia), wakil-wakil ketua Konstituante, dan antara 13 hingga 17 anggota Konstituante lainnya yang mewakili berbagai golongan dan aliran serta diangkat oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Panitia Musyawarah tidak memerlukan kuorum untuk memulai sidang, tetapi hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan mayoritas dua pertiga apabila lebih dari setengah jumlah anggotanya hadir. Panitia Musyawarah Konstitusi ini penting karena tugasnya meliputi koordinasi kegiatan dan usul serta penyelesaian masalah yang timbul dalam sidang pleno, dalam Panitia Persiapan Konstitusi, dan dalam komisi-komisi konstitusi.

Melalui penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa produk-produk konstituante merupakan produk dari proses demokrasi, merepresentasikan kehendak dari kurang lebihnya hampir seluruh golongan/aliran. Lewat sidang konstituante, tiap perwakilan aliran dan golongan bebas, egaliter, dan independen dalam mengemukakan gagasannya masing-masing.

D. Kegagalan Sidang Konstituante

Sebab utama sidang konstituante gagal adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1958, namun pemicunya adalah diskusi perdebatan negara yang berlarut-larut tersebut

mau bergabung jika tujuh kata tersebut masih ada. Atas dasar ini, kaum Islam akhirnya bersedia berkompromi sekali lagi, dengan harapan ada momentum/kesempatan bagi mereka untuk meneruskan cita-cita/keinginan Islam diterima sebagai dasar/ideologi negara, dan akhirnya momentum tersebut didapatkan saat pasca pemilu pertama (1955).

Oleh karena itu dapat dijelaskan mengapa pada momentum sidang Konstituante, Blok Islam tidak mau berkompromi sekalipun. Kompromi sudah sering mereka lakukan baik pada saat sidang pertama tentang dasar negara lewat BPUPKI, kemudian peristiwa khusus penghapusan tujuh kata, dan akhirnya puncaknya saat sidang konstituante.

Di lain sisi, Blok Pancasila juga berusaha mempertahankan posisinya yang sudah di atas angin, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan haruslah tetap sebagai dasar negara sampai kapan pun, terlebih-lebih bahwa posisi kekuasaan ada di kubu mereka yang ditandai kepemimpinan puncak yaitu Dwi Tunggal Sukarno-Hatta berada di barisan Blok Pancasila, posisi mereka sendiri secara kuantitas dan komposisi yang ada di barisan ini juga berkualitas, inilah juga yang membuat mereka juga berusaha mempertahankan posisinya yang sudah bagus.

Segigih apa pun usaha kedua blok di atas, namun sejarah berkata lain. Presiden Sukarno dengan desakan Angkatan Darat akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa akhirnya Presiden Sukarno dengan dukungan Angkatan Darat mengeluarkan dekrit tersebut dan menghasilkan era baru pemerintahan yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Dengan dekrit tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dikukuhkan.

Sebagai penegasan, pada akhirnya dikeluarkannya Dekrit Presiden dan terbitlah era kepemimpinan baru yaitu Demokrasi Terpimpin, menjadi momentum de-ideologisasi Islam secara permanen, karena pada periode-periode sesudahnya, baik Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan Orde Baru, Islam sudah tidak lagi bisa diangkat kembali sebagai tema diskursus dominan karena situasi represif di kedua periode pemerintahan tersebut.

Ada yang perlu kita garis bawahi bahwa pada masa sidang BPUPKI kita menjumpai bahwa gagasan sekularisme tidak hanya berpusat pada Pancasila (dan bukan Islam) sebagai dasar negara, melainkan juga berpusat pada persoalan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan/negara kebangsaan/*etat* nasional, dan bukan negara Islam. Sedangkan pada periode ini, terjadi kontinuitas gagasan sekularisme Islam Islam yaitu semakin kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus diskontinuitas, yaitu persoalan negara kesatuan/kebangsaan tidak menjadi wacana pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa kesatuan dan persatuan bangsa diakui sebagai sesuatu yang nilai universal dan umum sehingga dibutuhkan oleh suatu komunitas yang disebut bangsa. Tanpa ada kesatuan dan persatuan, maka kemerdekaan menjadi sulit diraih dan selanjutnya pembangunan bangsa dalam rangka memperbaiki bangsa yang telah hancur akibat penjajahan berabad-abad bisa dicapai.

Dengan intervensi pemerintah lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akhirnya perkembangan wacana sekularisme Islam Islam berujung pada gagalnya majelis

pertama, diraihnya kemerdekaan, *kedua*, penerapan sistem pemerintahan demokrasi, yakni demokrasi parlementer, *ketiga*, kebebasan pers, *keempat*, akan dilaksanakannya sidang Konstituante pasca pemilihan umum untuk menyusun konstitusi yang lebih baik dari konstitusi UUD 1945 yang pada waktu disusun apa adanya untuk keperluan syarat konstitusional negara merdeka. Oleh karena periode 1945-1959 cukup panjang dan agar usaha pengamatan sekularisme Islam lebih fokus, maka dipilih pembacaan sekularisme hanya pada sidang Konstituante saja.

Sekularisme Islam pada masa ini bergerak di nada yang sama sebagaimana periode sebelumnya (1930-1945), yaitu mempertahankan Pancasila yang dari periode sebelumnya sudah disepakati sebagai dasar negara, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan atau negara nasional sebagai penegas identitas sekularisme Islam. Sedangkan pihak seberang, yaitu penentang sekularisme Islam, bersikap habis-habisan untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar dan ideologi negara, Negara Islam, menolak demokrasi dengan kebebasan mutlak, menolak politik toleransi, dan lain-lain.

Alasan-alasan Blok Pancasila mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena *pertama*, Pancasila lebih cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang plural, majemuk, heterogen, dan multikultural. *Kedua*, hanya dengan Pancasila, berbagai aliran pemikiran, seperti nasionalisme, Agama, Komunisme, atau pun aliran agama (seperti Islam, Kristen, Katolik, Kepercayaan, dan lain-lain) dapat dipertemukan. Sehingga menurut Blok Pancasila, Pancasila lebih universal, lebih lentur/elastis. *Ketiga*, hanya Pancasila

perdebatan dasar negara, sedangkan pihak eksekutif lebih disibukkan pada urusan politik konfrontasi (karena harus berhadapan dengan usaha pemadaman pemberontakan daerah, pengembalian Irian Barat, dan konfrontasi Malaysia), efeknya perekonomian rakyat menghadapi berbagai macam persoalan, dimulai dari adanya hiper-inflasi, sehingga masyarakat tingkat rumput mengalami penurunan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akibat-akibat serius tersebut memaksa Presiden (dengan dukungan Angkatan Darat) melakukan dekrit, sehingga berakhirilah sidang konsituante, dan muncullah era politik baru, yaitu Demokrasi Pemimpin.

Mengingat bahwa periode ini ruang kebebasan dalam berpendapat, mengajukan gagasan/usulan, menentukan sikap untuk menerima/menolak pendapat pihak lain, dan memiliki ruang kebebasan untuk membangun afiliasi pada organisasi tertentu, maka tipologi sekularisme pada periode ini adalah *soft secularism*, namun cenderung mengarah pada *hard secularism* karena ditandai dengan tiadanya kompromi kedua belah pihak. Mengarah pada *hard secularism* karena sidang tersebut akhirnya berujung pada kegagalan karena didekrit oleh Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959.

tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, g) tujuh kekuatan-kekuatan sosial daripada revolusi kita, h) musuh-musuh revolusi Indonesia. *Ketiga*, pelaksanaannya, a) apa arti retooling, b) realisasi tergantung pada pelaksanaannya, c) Pancasila adalah juga suatu moral dan tuntutan pergaulan hidup.

Lebih jauh lagi dalam rangka tema revolusi itu, terutama untuk menyatukan kekuatan-kekuatan revolusioner Indonesia, perlu disatukannya kekuatan-kekuatan Nasionalis, kekuatan-kekuatan agama dan kekuatan-kekuatan Komunis. Nasakom menjadi bagian dari pemikiran mengenai Revolusi Indonesia tersebut. Sehingga pemikiran yang pernah dikemukakan Sukarno pada tahun 1930-an kembali lagi diangkat pada tahun 1960-an.

Dalam periode demokrasi terpimpin, sekularisme Islam bergeser menyimpang jauh dari wacana-wacana sekularisme Islam sebelumnya. Walaupun tidak ada perubahan Pancasila sebagai dasar negara dengan ditandai oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (kembali ke UUD 1945), namun status Pancasila sebagai ideologi negara menjadi kabur, bahkan akhirnya yang lebih menonjol adalah doktrin Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin) dan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Pancasila pada periode pemerintahan ini ditafsirkan menurut berbagai macam ideologi, ia dibaca dan diinterpretasi oleh Sukarno dalam kerangka ideologi totaliter (Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin). Mengapa pengejawantahan Pancasila sebagai dasar negara menjelma menjadi totaliter? Hal ini antara lain dipicu oleh pandangan bahwa Pancasila adalah

Adapun pertimbangan-pertimbangan partai NU dalam menempuh posisi ini, antara lain: *pertama*, dalam menghadapi demokrasi Terpimpin, umat Islam dihadapkan pada dua macam ijtiyah politik yang berbeda, ijtiyah pertama, berkesimpulan bahwa umat Islam lebih baik masuk ke dalam sistem demi kepentingan Islam (ijtiyah dari pihak kelompok Islam pesantren yang diwakili oleh partai NU), sedangkan ijtiyah kedua berpendapat bahwa demi kepentingan Islam pula, maka umat Islam harus melawan sistem (ijtiyah yang bersumber dari pihak kelompok modernis Islam yang diwakili oleh Masyumi), keduanya sama-sama berdasarkan keyakinan agama.²⁸

Berdasarkan studi Syafi'i Ma'arif, dalam pandangan Idham Chalid mengenai keikutsertaan partai NU dalam Demokrasi Terpimpin didasarkan pada nasihat Iman Syafi'i bahwa tidak wajar bagi seorang muslim untuk berbuat atau mengambil suatu langkah sekiranya tidak tahu bagaimana hukum Allah tentang perbuatan tersebut.²⁹ Menurut K.H. Idham Chalid, menyetujui dan masuk sistem politik seperti Demokrasi Terpimpin adalah sesuai dengan hukum Allah, sebagaimana yang beliau pahami berdasarkan nasihat Imam Syafi'i di atas. Pendapat ini bila dihubungkan dengan penjelasan K.H. Sjaichu, bagi NU dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, demokrasinya harus yang dititiktekan, karena menurut Islam, demokrasi tanpa pamimpin akan menjurus pada anarki, demikian sebaliknya kepemimpinan tanpa demokrasi akan mengarah pada

²⁸ Wawancara Syafi'i Ma'arif dengan K.H. A. Sjaichu di Jakarta, tanggal 17 maret 1978 dalam usaha menyelesaikan tesis masternya di Ohio University

²⁹ Idham Chalid, *Islam dan Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Lembaga Penggali dan Penyebar Api Islam-Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia, Endang dan Pemuda, 1965), 19.

menangkap dan memenjarakan para pemimpin dan membubarkan dua partai tersebut.

Perlu diketahui pula, ketidakpercayaan Sukarno terhadap pimpinan Masyumi (Natsir) sudah lama semenjak jauh ideologi Manipol-Usdek dan Nasakom didengungkan. Natsir menuturkan dalam wawancaranya dengan Syafi Ma'arif,⁵⁰ pada intinya saat revolusi, Natsir adalah menteri terdekat Sukarno, sering Natsir diundang sarapan pagi bersama di Istana. Selama ibukota di Yogya, Natsir-lah yang diminta untuk menuliskan naskah pidato peringatan 17 Agustus 1945, bila ada jadwal lawatan ke luar negeri, orang pertama yang diajaknya adalah Natsir, hubungan demikian erat tersebut sehingga masa-masa polemik dulu pada tahun 1930-an telah dilupakan. Apalagi saat Natsir pada tahun 1950 berhasil memelopori mosi dalam parlemen untuk membentuk sebuah negara kesatuan dengan melebur semua negara boneka ciptaan Belanda, dan dengan keberhasilan tersebut, Natsir ditunjuk sebagai perdana menteri pertama, walaupun PNI tidak terlibat di dalamnya sekalipun. Namun semenjak terjadinya perbedaan pendapat, mengenai pengembalian Irian Barat, saat Sukarno menyatakan bahwa “sebelum ayam berkokok 1 Januari 1951, Irian Barat harus sudah masuk ke pangkuan RI.” Tindakan tersebut bagi Natsir bertentangan dengan konstitusi pemerintahan parlementer. Bagi Natsir, pernyataan Sukarno sebagai kepala negara (dan bukan kepala pemerintahan) tersebut bertentangan dengan kebijakan kabinet. Sehingga ketika masalah tersebut dibawa ke sidang kabinet dengan mengundang Sukarno dan Hatta, akhirnya diputuskan pemungutan suara, siapa pihak menteri yang

⁵⁰ Wawancara Syafi'i Ma'arif dengan Natsir, pada tanggal 12 Maret 1978 dalam Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, 70.

Dengan mengacu pada indikasi derajat kebebasan memberikan pendapat, kebebasan menentukan sikap, dan kebebasan membentuk aliansi/afiliasi pada era ini *zero toleration*. Masyumi tidak mampu menunjukkan *power*-nya. Dan berkaca dengan NU sebagai komponen Islam yang mewakili Agama dalam ideologi Nasakom, kontribusi NU dalam mempengaruhi berbagai keputusan-keputusan politik dari pihak eksekutif pun tidak ada.

Meskipun Piagam Jakarta diakui sebagaimana yang tercermin dalam keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun pengaruhnya dalam konstitusi politik baik dasar negara, maupun konstitusi politik lainnya tidak ada sama sekali. Sehingga bisa dikatakan bahwa sekularisme pada masa ini bergerak pada pendulum *hard secularism*, artinya batas minimum kebebasan bertindak institusi agama dalam mengatur institusi politik tidak ada sama sekali alias nol.

BAB V.

DISKURSUS SEKULARISME ISLAM PERIODE ORDE BARU (1965-1983)

A. Latar Belakang Sekularisme Islam pada Periode Orde Baru (1965-1983)

Pemikiran sekularisme Islam kemudian berubah pada masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan yang ditandai dengan pergantian kekuasaan dari Sukarno (Suharto menyebutnya sebagai pemerintahan lama-Orde Lama) ke pemerintahan baru, era baru, kebijakan baru (Orde Baru). Pemberontakan G 30S/PKI terjadi bersamaan dengan terjadinya berbagai masalah ekonomi, antara lain inflasi sebesar 650%, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sehingga bagi orang miskin, masa tahun 1965-an merupakan masa tersulit, bencana kelaparan di depan mata, dilukiskan pada masa itu sebagai masa yang terburuk bagi pemerintahan Orde Lama, rakyat antri mendapatkan minyak, sembako, dan lain-lain.

Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) atau Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat pada waktu itu dengan berbekal “mandat” dari Presiden Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966, menjalankan tugas mengoordinasikan kekuasaan pemerintahan. Ia melakukan tindakan penumpasan PKI beserta organisasi massa-nya dengan didukung berbagai kalangan fungsional, antara lain: pemuda, pelajar, dan mahasiswa, kaum profesional; dosen, guru, pengusaha, aktivis hukum dan politik.

Dengan berbekal “mandat” yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Suharto mengambil alih kendali situasi politik nasional setelah terjadi berbagai aksi demonstrasi mahasiswa/pelajar yang anti-komunis dan anti-Sukarno di ibukota maupun kota-kota lain yang menuntut dibubarkannya PKI, penurunan harga, dan pembubaran kabinet Dwikora. Melalui dukungan koalisi antara lain militer, kelompok fungsional, kesatuan mahasiswa dan pelajar, organisasi sosial-keagamaan dan sebagainya, Soeharto selaku Pangkomkaptip (Panglima Komando Keamanan dan ketertiban) pada waktu itu akhirnya berhasil menghancurkan PKI pada 1965 beserta akar-akarnya.

Berbekal pada Supersemar itu juga dan keberhasilannya memulihkan keamanan yang sebelumnya *chaos* akibat G30S/PKI, maka pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) akhirnya mengangkat Suharto sebagai Presiden Indonesia RI.

Mengingat masalah utama dan mendesak yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru adalah memecahkan masalah-masalah ekonomi yang kacau dari warisan Orde Lama, maka Orde Baru tiba pada titik penetapan skala prioritas penyelesaian masalah, yaitu mengatasi problem ekonomi. Sehingga berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya--Orde Lama--menjadikan politik sebagai Panglima, maka pada periode ini titik tekannya berubah menjadikan Ekonomi sebagai panglima. Adapun beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. *Pertama*, dalam rangka menyelesaikan hiper-inflasi yang telah mencapai 650%, Indonesia memperbaiki hubungan internasionalnya dengan negara-negara liberalis dan kapitalis, yang sebelumnya di

memperkecil kekuatan politik Islam karena potensinya dapat menyaingi kekuatan politik Orde Baru. Hal ini menjadi semakin jelas ketika pemerintah Orde Baru menolak (1) tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968, dan (2) dilangsungkannya Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun yang sama.¹⁰

Dengan hasil pemilihan umum 1971, kekuatan Islam politik makin lama makin merosot, salah satunya disebabkan oleh langkah pemerintah yang menjadikan Golkar (Golongan Karya) yang awalnya merupakan kekuatan sosial politik yang berfungsi mengimbangi pengaruh PKI berubah menjadi mesin politik Orde Baru yang berguna untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat kekuasaannya.

Salah satu langkah Orde Baru untuk memperbarui fungsi Golkar adalah dengan cara memberikan ketetapan antara lain: 1) menciptakan monoloyalitas dengan cara mewajibkan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota Golkar dan melarang berafiliasi dengan partai politik lain. Amir Machmud--Menteri Dalam Negeri Periode 1969-1982--mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12/1969 yang salah satu petikan aturan berisi: "seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan di tingkat provinsi dan lokal *harus diganti* jika mereka bergabung ke dalam partai-partai

¹⁰ Lihat Allan Samson, "Islam in Indonesia Politics," 1001-1017, Kenneth E. Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, 44-49; B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, 153; Deliar Noer, "Contemporary Political Dimension of Islam," M.B. Hooker (ed), *Islam in Southeast Asia*, Leiden: E.J. Brill, 1983), 192.

agama yang ajarannya kekal, dan universal sepanjang zaman, namun yang perlu diingat bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang kekal dan universal untuk seluruh umat manusia karena mengandung gagasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Doktrin tekstualnya tetap, namun interpretasi atas doktrin tersebut perlu disesuaikan dengan tuntutan situasi sosial.²²

Dengan melakukan reinterpretasi tersebut, diharapkan pemahaman kaum muslim terhadap pesan-pesan Islam tidak stagnan, melainkan dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Bukankah perubahan merupakan sesuatu yang bersifat pasti, sehingga pemahaman dan pelaksanaan Islam dalam kehidupan pun disesuaikan dengan tuntutan zaman itu sendiri.

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa Islam paling menonjol pada masa itu, HMI menjadi motor penggerak pemikiran Islam yang paling produktif dalam merespons situasi Islam politik yang berkembang di tanah air. Walaupun sebenarnya agenda-agenda pembaruan pemikiran Islam politik ini tidak pernah menjadi kebijakan resmi HMI. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan pendapat di internal anggota HMI mengenai sifat dan substansi gerakan pembaruan di satu sisi dan sejarah politik Islam di sisi lain. Meskipun demikian, beberapa pemimpin dan aktivis HMI yang berpengaruh menjadi pendorong lokomotif gerakan pembaruan pemikiran ini.²³

²² Pada umumnya diyakini bahwa ajaran-ajaran Islam bersifat kekal. Meskipun demikian, untuk memahami pesan-pesannya, khususnya pada masa setelah Nabi Muhammad, dibutuhkan penafsiran terus-menerus, sejalan dengan perubahan situasi. Dalam tradisi intelektual Islam, upaya ini disebut *ijtihad*. Di sini, *ijtihad* bermakna suatu usaha untuk mendapatkan penilaian independen, yang tidak saja dimaksudkan untuk menemukan makna ajaran-ajaran Islam, melainkan juga untuk mengungkap prinsip-prinsip umumnya.

²³ Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), *Pergolakan Pemikiran Islam*,. 144-174.

kekal dan universal, maka ada kewajiban *inheren* bagi kaum muslim untuk menampilkan pemikiran kreatif yang relevan dengan tuntutan-tuntutan zaman modern.

Pandangan-pandangan utama Nurcholish berasal dari pemahamannya yang radikal terhadap dua prinsip dasar Islam : (1) konsep al-tauhid (keesaan Tuhan), dan (2) gagasan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di atas bumi. Dari kedua prinsip tersebut, Nuecolish Madjid merumuskan preposisi pemikirannya sebagai berikut: pertama, hanya Allah yang memiliki kebenaran yang mutlak, Ia esa, monoistik, tidak ada yang menyamai, dan sebanding dengan Dia, sehingga Ia satu-satunya *Ilah* atau Tuhan yang patut disembah. Sebagai Tuhan yang merupakan pencipta dari segala makhluk, termasuk bumi beserta isinya, salah satunya manusia, tentu saja Tuhan memiliki misi terhadap penciptaan-Nya tersebut. Adapun misi penciptaan Manusia adalah *Khalifah fil Ardh*, yaitu *Khalifah*/pemimpin di muka bumi. Dengan demikian, sebagai khalifah di muka bumi, manusia mengelola dan mengatur urusannya di bumi untuk kepentingan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, sehingga masalah-masalah keduniaan yang temporal (sosial, kultural, atau politik) menjadi urusan yang diselesaikan dengan prinsip-prinsip hukum manusia sendiri dengan prinsip memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin dan menjauhkan dari kemudhorotan semaksimal mungkin. Memandang dunia dan semua yang ada di

Amerika dan Perancis, keduanya memiliki sejarah pengalaman relasi agama dan negara yang sama-sama menegangkan, namun karena dinamika sejarah keduanya berbeda, hasilnya wajah sekularisme Islam antara kedua negara tersebut pun juga berbeda. Jika di Perancis, Negara melindungi dirinya sendiri dari agama, cenderung memandang curiga ketika agama terlibat dalam urusan publik, sehingga negara membebaskan dirinya dari urusan agama, namun sebaliknya, di Amerika Serikat, malah sekularisme bermakna agama melindungi dirinya sendiri dari intervensi negara, agama cenderung membebaskan dirinya dari pengaruh negara.³⁸

Pandangan mengenai ‘‘perkembangan yang membebaskan’’ di ataslah yang digunakan Nurcholish dalam mengartikulasikan gagasan-gagasannya mengenai konsekuensi logis dari monoteisme Islam (*al-tawhid*). Sebagaimana yang ia tulis dalam makalahnya: sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme menurut Madjid merupakan sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang dekat sekali maknanya dengan agama baru. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan sekularisasi ialah setiap bentuk proses yang membebaskan, yaitu membebaskan diri dari penafsiran yang bersifat transendental, kekal, dan sakral. Proses pembebasan ini penting karena aktivis politik Islam itu sendiri tidak sanggup membedakan mana urusan sakral dan profan, mana urusan *ukhrawi* (akhirat) dan duniawi, mana urusan kekal dan temporal, sehingga sekularisasi yang dimaksud oleh Madjid menduniawikan nilai-

³⁸ Nader Hashemi, *Islam Sekularisme dan Demokrasi Liberal Menuju Demokrasi dalam Masyarakat Muslim* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 182-183.

Melihat dari rentang sejarah panjang HMI di tahun pendiriannya 1947 hingga masa awal pemerintahan Orde Baru, HMI menjadi organisasi mahasiswa Islam yang mampu menjadi saluran aspirasi pemikiran, pendapat mahasiswa Islam dalam rangka mewarnai diskursus sekularisme Islam Politik di masanya. Pada masa Demokrasi terpimpin, HMI berposisi sebagai pendukung Islam sebagai dasar negara, namun kemudian berbanding terbalik dengan periode Orde Baru berikutnya.

Periode kepemimpinan HMI pada masa permulaan pemerintahan Orde Baru adalah Nurcholish Madjid. Dengan berlatar belakang tradisionalis, ayahnya yaitu Abdul Madjid, adalah seorang kyai NU yang memiliki latar belakang afiliasi politik ke Masyumi. Setelah menyelesaikan studinya di Darul 'Ulum, pada tahun 1955, dia dan Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, ia melanjutkan studinya ke IAIN Hidayatullah Jakarta. Di sanalah ia pertama kalinya berkenalan dengan para tokoh reformis dan Masjumi yang berpengaruh. Lebih penting lagi, dia mendapatkan akses yang lebih besar ke literatur saintifik dan pengetahuan umum. Pertemuannya dengan para mahasiswa dari beragam universitas dan latar akademis di HMI memberinya sebuah media pembelajaran yang dapat memperkuat kapasitas intelektualnya.⁶³

Dengan kapasitas intelektualnya, afiliasi pendidikannya yang beragam disertai wawasan pengetahuan Islamnya yang luas,⁶⁴ ia mampu menjembatani berbagai faksi di tubuh HMI. Dia adalah seorang pemimpin yang bertipe *solidarity maker* seperti Tjokroaminoto. Kombinasi kapasitas intelektual dan gaya

⁶³ Deskripsi tentang biografi Nurcholish Madjid dapat dilihat Malik dan Ibrahim (1938: 121-138)

⁶⁴ Disebutkan oleh seseorang bahwa Nurcholish Madjid digambarkan sebagai kutu buku, menurut temannya buku adalah pacar pertamanya.

kepemimpinannya menempatkannya pada kesempatan yang istimewa, yakni ia terpilih sebagai ketua HMI untuk dua periode berturut-turut (1966-1968 dan 1968-1971) yang tidak pernah terjadi pada generasi kepemimpinan HMI sebelumnya. Di HMI inilah, Madjid mendapatkan ruang/tempat mengeksplorasi gagasannya tentang Islam modern dalam konteks ke-Indonesia-an.

Para aktivis HMI sepanjang periode kepemimpinan Nurcholish Madjid, mengalami situasi yang dilematis. Di satu sisi identifikasi HMI dengan Masjumi selama masa Orde Lama yang mendukung Islam sebagai ideologi, namun di sisi lain HMI berhadapan dengan kebijakan depolitisasi dan deparpolisasi Islam Politik pada masa Orde Baru. Dan di sisi lainnya lagi, dominasi HMI di antara organisasi mahasiswa yang ada sejak tahun 1960-an dan idealisme para anggotanya untuk bisa memainkan peranan publik yang signifikan di masa depan. Situasi yang membingungkan ini menjadikan para aktivis HMI dalam keadaan krisis identitas, antara kembali ke proyek “Islamisasi” dunia Islam politik yang belum selesai yang ternyata dihambat oleh represifitas politik Orde Baru ataukah beralih ke proyek modernisme/liberalisme pemikiran dan aksi politik Islam.

Dihadapkan pada dilema-dilema di atas, aktivis Islam HMI terdorong untuk mengembangkan sebuah wacana yang strategis dan tepat terhadap tantangan modernisasi dan pemarginalan Islam politik. Pada saat yang sama, dituntut pula adanya respons terhadap dilema antara apakah mendukung “integrasi umat” ataukah mendukung agenda liberalisasi pemikiran Islam yang dikenal sebagai “gerakan pembaruan.” Secara internal, HMI harus memilih apakah tetap

independen secara politik ataukah berada di pihak organisasi-organisasi sosial-politik Islam, dan apakah menjadi organisasi kader ataukah organisasi massa.

Pada awalnya, reaksi umum dari para intelektual HMI terhadap proyek modernisasi Orde Baru bersikap defensif. Modernisasi dianggap sebagai sebuah dalih bagi proses westernisasi, dan di dalamnya terkandung proses sekularisme yang berbahaya. Dalam perkembangan lebih jauh, muncul tiga jenis respons: liberal, reaksioner (Islamis), dan moderat (moderat-reaksioner).

Respons liberal yang pertama-tama datang dari aktivitas HMI Yogyakarta, yang kadangkala disebut kelompok Yogya. Cabang ini pernah mendukung manipol-USDEK selama periode Demokrasi Terpimpin. Di antara para intelektual terkemuka dari kelompok ini adalah Djohan Effendy, Ahmad Wahib, dan Dawam Rahardjo. Demikian Djohan dan Wahib termasuk liberal-jauh (*far liberal*), sementara pemikiran Dawam bisa dianggap sebagai liberal-tengah (*Center Liberal*). Di luar HMI, komunitas epistemik lainnya yang memengaruhi perkembangan intelektual dari para intelektual muda ini ialah sebuah kelompok studi yang dikenal sebagai "*Limited Group*." Kelompok ini mulai hidup sejak tahun 1967 sampai dengan 1971 dengan Prof. Mukti Ali sebagai mentornya, yakni Dosen IAIN Yogyakarta yang berpendidikan barat yang mengajarkan kepada mereka keahliannya dalam ilmu perbandingan agama dan ilmu Islam modern.

ada kemungkinan adanya sekularisme (termasuk humanisme, liberalisme, dan komunisme) dan weteranisasi yang bersembunyi dibalik seruan “modernisasi” ini. Dalam pandangannya, sekularisme harus dilawan karena hal itu akan menghancurkan dasar agama dari negara Indonesia. Pada saat yang sama, dia menekankan pada pentingnya ideologi dan agama sebagai syarat bagi terarahnya kehidupan nasional. Modernisasi dalam konteks Indonesia, menurutnya, tidak boleh mengakibatkan berakhirnya ideologi, karena kehidupan tidak mungkin berjalan baik tanpa seperangkat kepercayaan, ide, sikap dan keyakinan. Terakhir, dia mengingatkan akan bahaya agenda tersembunyi yang dikembangkan oleh beberapa elite Indonesia yang kebarat-baratan yang sangat tidak suka dengan segala sesuatu yang bernada Islam. Sehingga, mereka akan mengarahkan modernisasi ke arah westernisasi untuk memarginalkan aspirasi-aspirasi politik Islam. Karena artikelnya yang memperlihatkan dukungan Madjid terhadap aspirasi-aspirasi politik Islam, dengan segera ia digelari dengan sebutan “Natsir Muda”.

Ketika Orde Baru menolak rehabilitasi Masyumi, para intelektual HMI pada mulanya menjadi sangat kecewa. Kemudian, kelompok liberal mulai menganut anggapan bahwa komitmen HMI dan kaum Muslim secara umum seharusnya bukanlah kepada organisasi-organisasi atau para pemimpin Islam, melainkan lebih kepada nilai-nilai Islam. Dalam pandangan mereka, Islam itu sendiri tak harus diperlakukan sebagai ideologi, tetapi lebih sebagai sebuah sumber bagi ajaran-ajaran moral dan etika yang universal. Bagi kelompok ini, tuntutan formal tentang adanya sebuah partai Islam atau negara Islam, bukan saja

tak perlu, melainkan juga keliru. Dengan pemikiran demikian, kelompok ini melangkah lebih jauh dengan mendukung Pancasila sebagai prinsip negara.

Di sisi lain, kelompok Islamis terus sibuk dengan argumen-argumen apologetik bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan juga merupakan pandangan dunia yang lengkap, dan bahwa dalam Islam, tak ada pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan politik. Karena Orde Baru melakukan represi terhadap Islam politik, para intelektual kelompok ini mencoba menemukan cara-cara lain untuk menyosialisasikan aspirasi-aspirasi politik Islam.

Kelompok moderat berusaha untuk meninggalkan argumen-argumen apologetik itu lewat kesediannya untuk mengkritik argumen-argumen Islam yang standar serta kelemahan yang dimiliki oleh umat Muslim. Namun, kelompok ini masih menganggap Islam sebagai sebuah ideologi politik. Madjid, misalnya, dalam periode kepemimpinannya yang pertama, mengkritik pemakaian buku karya Tjokroaminoto, yaitu *Islam and Socialism*, oleh HMI dalam latihan kadernya karena kecenderungan apologetiknya. Pada saat yang bersamaan, dia menulis sebuah buku panduan yang terkenal untuk tujuan-tujuan latihan kader HMI, yang berjudul *Islamisme*, yang tetap menampilkan Islam sebagai sebuah ideologi alternatif buat komunisme, kapitalisme, dan ideologi-ideologi sekular lainnya.⁶⁷

Mengenai integrasi umat, para intelektual HMI pada awalnya memandang isu ini sebagai perhatian utama. Kongres HMI ke-8 di Solo (10-17 September 1966) mendukung ide Kongres Umat Islam. Kelompok liberal kemudian lebih

⁶⁷ Malik dan Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat* (Bandung: Zaman Wacana Muda, 1998), 125.

menyukai agenda gerakan pembaruan Islam, bahkan meskipun dengan memprioritaskan agenda ini akan berarti menyebabkan terciptanya ketegangan hubungan dengan umat. Bagi kelompok ini, problem utama bagi kaum Muslim Indonesia bukanlah perpecahan Islam, melainkan stagnannya pemikiran Islam. Namun, bagi kelompok Islamis, perselisihan-perselisihan di kalangan internal umat merupakan akar dari ketidakberdayaan kaum Muslim, dan oleh karenanya, mempertahankan solidaritas Islam dianggap jauh lebih penting daripada petualangan intelektual yang hanya memuaskan diri sendiri. Bagi kelompok moderat, rekonstruksi pemikiran Islam itu penting, tetapi tidak perlu membawa resiko terciptanya ketegangan hubungan dengan umat dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Meskipun terdapat tekanan-tekanan (politik) yang bersifat eksternal yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, terdapat perkembangan internal yang positif yang membantu meningkatkan rasa percaya diri sendiri dan ekspektasi para anggota HMI. Penguatan pengaruh intelegensia muda Islam sejak Orde Lama justru semakin meningkat setelah berlangsungnya peralihan kekuasaan ke Orde Baru. Di tengah tenggelamnya gerakan-gerakan kiri, muncul peningkatan dalam ketertarikan mahasiswa untuk belajar Islam dan bergabung dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam. Pada saat yang sama, pengajaran agama di sekolah-sekolah dan universitas-univeristas sekular diwajibkan.

Meningkatnya ketertarikan terhadap studi-studi, praktik-praktik, dan organisasi-organisasi Islam (selanjutnya disebut “kebangkitan Islam”) mendapatkan reaksi yang berbeda-beda dari para intelektual HMI. Bagi kelompok

Jika pada masa pemerintahan Orde Lama, baik masyarakat kecil, aktivis politik dan intelektual muslim bebas untuk memberikan kontribusi politik lewat pandangannya masing-masing, namun tidak pada masa Orde Baru.

Dengan pendasaran bahwa pada masa lalu masyarakat dengan mudah terbagi-bagi ke dalam aliran politik dan ideologi yang sempit, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan kebijakan deparpolisasi dan depolitisasi lewat *floating mass*, yaitu sebuah kebijakan yang berusaha menjauhkan masyarakat dari aktivitas politik. Hasilnya tidak hanya masyarakat akar rumput yang tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi politiknya, demikian pula di sisi lain partai politik baik Islam maupun nasionalis (PDI) program-program mereka tidak mampu menyentuh masyarakat akar rumput. Hasilnya adalah mereka tidak pernah berinteraksi, berdialog, berdiskusi untuk membahas kebutuhan masyarakat yang hendak dipecahkan, dampak lanjutannya mereka tidak pernah menang selama periode Pemilu pada masa kepemimpinan Orde Baru tersebut.

Depolitisasi dan deparpolisasi itu kemudian mendapat respons oleh intelektual muslim muda, baik yang tergabung dalam organisasi HMI Jakarta (Nurcholish Madjid), HMI Yogyakarta lewat forum diskusi “limited group”, PII, dan sejenisnya akhirnya menyerukan para aktivis politik Islam tersebut untuk merubah strategi perjuangannya selama ini. Jika pada masa lampau, perjuangan Islam dilakukan lewat saluran politik yang berarti jalur Islam struktural, Islam formalistik/legalistik, maka ada saluran politik Islam lain, yaitu jalur Islam kultural, baik di bidang seni dan kebudayaan, pemikiran, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Gerakan mereka pun memiliki perubahan karakteristik. Jika

pada periode sebelumnya perjuangan aktivis politik Islam berkarakter eksklusif, skriptualistik (mengacu pada teks-teks suci Al-Qur'an sebagai pendasaran perjuangannya), formalistik dan legalistik, akhirnya berubah menjadi substansialis, kulturalis dan inklusif. Sehingga pemahaman Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tidak lagi dipahami sebagai Islam yang harus diartikulasikan secara subjektivisme ideologis dan simbolik melainkan diterjemahkan dalam agenda-agenda yang lebih luas seperti kemanusiaan, kesejahteraan, egalitarianism, demokratisasi, dan lain-lain. Dengan agenda-agenda yang bersifat luas tersebut, maka perjuangan Islam bersifat menyeluruh, integratif, tidak mengenal batas-batas primordialisme kelompok agama tertentu, melainkan menjangkau luas seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dengan perjuangan Islam lewat saluran-saluran bidang di atas, maka Islam lebih mudah dikenal, lebih membumi, lebih mampu memberikan kemaslahatannya daripada jalur-jalur struktural atau formal lewat politik. Dari sisi penguasa Orde Baru, gerakan ini juga tidak dipandang sebagai ancaman terhadap "persatuan bangsa."

Meskipun seruan perjuangan Islam lewat jalur kultural, substansialis dan inklusif, pendekatan politik pun tetap masih digunakan namun sudah tidak lagi menjadi jalan satu-satunya.⁶⁹ Jikalaupun pendekatan politik Islam digunakan, namun pilihan politik dan salurannya pun berubah menjadi cair. Artinya partai-partai Islam tidak lagi menjadi alternatif satu-satunya untuk merealisasikan tujuan sosial politik Islam.

⁶⁹ Abdurrahman Wahid, Lukman Harun dan Moeslim Abdurrahman, "Mulai Ditinggalkan Aspirasi Umat Islam lewat Kelembagaan Formal," *Kompas*, 22 Oktober 1986.

Demikian sejak pertengahan tahun 1970-an, bersamaan dengan berlangsungnya proses restrukturisasi politik pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973, yang melahirkan tiga kontestan pemilu, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Islam), dan Golkar, maka gerakan Islam diartikulasikan ke dalam mekanisme-mekanisme yang lebih luas, tidak hanya partai politik, melainkan juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga penerbitan, lembaga kemanusiaan, dan lain-lain).

F. Sekularisme Islam Sekali Lagi: Pancasila sebagai Asas Tunggal

Gerakan sekularisme Islam pada era Orde Baru bertambah kian masif, setelah kebijakan penfusian atau penyederhanaan partai politik dilakukan, menyusul kemudian kebijakan *floating mass*, yaitu penerapan konsep massa mengambang untuk mencegah rakyat di tingkat akar rumput tidak lagi turut serta berpolitik agar fokus pada urusan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Namun kebijakan ini mengimplikasikan organisasi partai yang terikat dengan ketentuan ini menjadi tidak mengakar ke bawah, sehingga jauh dari jangkauan massa politik akar rumput yang justru secara kuantitatif jumlahnya lebih besar. Akibatnya hasil pemilu pada tahun 1971, perolehan partai Islam (PPP) dan Nasionalis (PDI) tidak sebanding bahkan kalah telak dengan perolehan suara Golkar. Untuk memperjelas perolehan suara PPP sebagai berikut, 27,12% pada Pemilu 1971, 29,29%, pada Pemilu 1977. Tetapi perpecahan yang terus berlangsung di dalam tubuh PPP, terutama semasa kepemimpinan John Naro (selain strategi pemerintah untuk secara intensif menarik banyak tokoh dan

Rusli Karim berpendapat bahwa pengasastunggalan Pancasila tidak lain sebenarnya didorong oleh kepentingan pemerintah untuk melaksanakan de-Islamisasi politik, sehingga tidak ada lagi pesaing politik yang berarti bagi kekuatan politik pemerintah yang direpresentasikan lewat Golkar.⁷⁸

Dan gaung Pancasila sebagai asas tunggal semakin kuat, ketika terjadinya peristiwa berdarah di Tanjung Priok, pada 12 September 1984. Sebelumnya kejadian tersebut, memang Mushalla ini dikenal sangat vokal terhadap segala kebijakan Islam politik Orde Baru, lewat ceramah-ceramah sholat Jumat dan memasang selebaran di masjid yang isinya mengajak jamaat Musholla untuk menentang kebijakan Pancasila sebagai Asas Tunggal.

Sebagai usaha meredam provokasi tersebut, dua petugas koramil datang meminta salah satu pimpinan musholla tersebut yakni Amir Biki untuk mencopot selebaran-selebaran tersebut,⁷⁹ namun Amir Biki menolak. Akhirnya petugas tersebut memasuki musholla tanpa mencopot sepatu dan mengambil selebaran-selebaran tersebut. Oleh karena terjadi pelanggaran etiket tempat ibadat, salah satu pengurus musholla yaitu Syarifuddin Rambe dan Shofwan Sulaeman membakar sepeda motor petugas, yang berakhir dengan penangkapan empat orang aktivis masjid karena pembakaran tersebut.

Dengan dipimpin oleh Amir Biki, mantan pendukung Orde Baru yang ikut memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa menentang Sukarno serta seorang pemimpin informal yang menonjol di daerah itu, mengajak umat Islam di daerah

⁷⁸ M. Rusli Karim, *Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 16-17.

⁷⁹ David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society: A Reader*. Routledge Curzon, 140. ISBN 978-0-415-23750-5.

Berdasarkan semua alasan di atas, tidaklah mengejutkan bila oposisi utama terhadap pemerintah Orde Baru, sering kali muncul dari para pemimpin dan aktivis Islam politik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, cukuplah jika dikatakan di sini bahwa hubungan politik di antara kedua belah pihak ditandai oleh permusuhan timbal-balik. Bahwa hubungan yang tidak harmonis itu masih tetap berlangsung sepanjang 1970-an dan berlanjut hingga pertengahan 1980-an, hal itu tampak dari beberapa gerakan yang muncul dengan membawa bendera Islam.

G. Pergulatan Kuasa: Konsolidasi dan Kontestasi, Respons Aktivis Islam terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal

Konsepsi asas tunggal melahirkan berbagai pertentangan dari berbagai macam unsur organisasi dan tokoh Islam. Beberapa menganggapnya sebagai usaha pemerintah untuk memaksakan program sekularisme terhadap pandangan hidup Islam. Beberapa pihak memandang kebijakan pemerintah ini sebagai warisan dari kebijakan kolonial Belanda yang membolehkan kaum Muslim untuk menjalankan ibadah ritual, namun membatasi/mejauhkan Islam dari hingar bingar politik. Bagi orang-orang seperti Sjafruddin Prawiranegara (seorang pemimpin Masjumi Moderat) dan banyak pemimpin Muslim pada masa itu, penetapan Pancasila sebagai dasar negara bisa diterima, namun sebagai asas tunggal/asas satu-satunya yang digunakan sebagai dasar atau pedoman organisasi sosial politik sukar sekali diterima. Dan begitu juga Sjafruddin menyatakan penolakannya dan mengkritik kebijakan ini dengan menggunakan “bahasa” yang sama yang dipakai

Meski terdapat ketidakpuasan dan penentangan yang kuat dari berbagai kelompok dan pemimpin muslim, kebijakan ini pada akhirnya diterima oleh organisasi politik Islam. Sedangkan organisasi Islam seperti PII dan kelompok pecahan HMI, yaitu HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Pertimbangan Organisasi) tetap tidak bersedia menerima asas tunggal. Konsekuensinya ia menghadapi pembubaran organisasi-organisasi tersebut. Karena dilarang, akhirnya PII dan HMI MPO menjadi gerakan-gerakan bawah tanah.

Untuk menghadapi sikap-sikap penolakan Pancasila sebagai asas tunggal, pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai cara-cara yang bersifat koersif/represif. Sumber keprihatinan dari kaum Muslim tidak hanya cara-cara koersif/represif itu sendiri, namun juga cara-cara tidak sportif yang menjadikan partai Islam dan aktivis Islam sebagai korbannya. Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh Ali Murtopo sebagai agen intelejen utama pada masa itu, ia berusaha mendekati tokoh Muslim militan, yaitu eks anggota NII/DI TII Kartosuwiryo, bernama Imran bin Muhammad Zein, membujuknya mendirikan organisasi militan yang kemudian dinamai sebagai Komando Jihad. Tujuan akhir dari usaha itu menjadi pembenaran bagi Ali Murtopo untuk menghabisi para aktivis Muslim secara luas, termasuk pula menghabisi kekuatan Islam sendiri, sehingga akhirnya, Pemerintahan Orde Baru kembali menang dalam Pemilu.

Akibat frustrasi yang mendalam, beberapa pimpinan muslim senior seperti Masjumi, Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara, Anwar Hardjono, A.M. Fatwa bergabung dengan para mantan jenderal senior, antara lain:

pihak yang salah adalah mereka yang tidak mendukung pembangunan (kontra-pembangunan).

I. Proposisi

Latar belakang sosial politik sekularisme pada periode ini antara lain situasi politik yang menghasilkan berbagai permasalahan politik yang kacau yang diakibatkan adanya pemberontakan G 30 S/PKI, dan kacaunya situasi ekonomi dapat dibuktikan lewat ditandainya munculnya inflasi 600%. Dengan pemberontakan G 30 S/PKI yang ditujukan untuk melumpuhkan fungsi-fungsi Angkatan Darat dengan cara menculik dan membunuh para jenderal papan atas (karena rival berat PKI selama ini bersumber dari Angkatan Darat), maka menyebabkan Suharto yang pada waktu itu berposisi sebagai mayor jenderal kemudian diangkat sebagai Panglima kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan ketertiban) untuk melakukan usaha penertiban dan keamanan yang kacau akibat manuver PKI. Dengan berhasilnya menumpas G 30 S/PKI dan kemudian dengan cara yang “cantik” Suharto mampu mengambil alih kekuasaan tanpa ada kekacauan yang lebih parah lagi, maka era pemerintahan Orde Baru pun dimulai. Dan berdasarkan warisan masalah dari Demokrasi Terpimpin atau yang dikenal dengan Orde Baru, maka masa sekularisme Islam pun mengalami perubahan warna/corak yang sama sekali baru dengan periode sebelumnya. Jika periode Orde Lama banyak menekankan politik sebagai determinasi sosial ekonomi, maka Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai determinasi kehidupan sosial politik.

Berdasarkan hasil kajian sekularisme Islam pada periode 1965-1983, ada beberapa hal yang bisa dipetik kesimpulannya, antara lain: *pertama*, bahwa sekularisme Islam pada periode ini bersumber dari kebijakan politik yang tunduk terhadap kepentingan logika stabilitas politik untuk kepentingan pemulihan ekonomi yang terpuruk hasil warisan pemerintahan sebelumnya, *kedua*, sekularisme Islam pada periode ini ditujukan untuk mematikan kekuatan oposisi politik pemerintah Orde Baru, baik yang bersumber dari kekuatan politik lama (partai nasionalis), khususnya kekuatan politik Islam, antara lain melalui kebijakan intervensi partai baru Islam—Parmusi, fusi partai, *floating mass*, monoloyalitas PNS dan ABRI yang keseluruhannya dikenal dengan kebijakan depolitisasi dan deparpolisasi Islam, dan terakhir pengasastunggalan Pancasila.

Ketiga, kebijakan yang dikeluarkan secara represif ini berakibat semakin kecilnya peluang bagi aktivis politik Islam untuk memperjuangkan idealisme dulu yang pernah disuarakan pada periode pra-kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, dan sidang konstituante, yaitu Islam sebagai dasar negara, negara Islam, Piagam Jakarta. Jangankan untuk memperjuangkan kembali ideasional yang dulu pernah disuarakan, untuk bernapas bebas dalam panggung politik lewat kepartaian pun, para aktivis politik Islam pun tidak bisa. Mereka berhadapan dengan berbagai manuver politik pemerintahan Orde Baru antara lain bongkar pasang kepemimpinan partai, penyederhanaan partai, penyusutan massa pendukung partai segmen PNS dan ABRI, pemutusan jaringan massa akar rumput partai, dan terakhir pengasastunggalan organisasi partai beserta basis pendukung partai yang bersumber dari organisasi massa. Jika dikomparasikan dengan Orde Lama,

manuver politik Orde Baru tidak jauh beda. Orde Lama juga berusaha melakukan penyederhanaan partai sehingga dari puluhan partai menjadi sepuluh partai, pemaksaan penerapan Nasakom tidak jauh berbeda dengan pemaksaan penerapan asas tunggal Pancasila, gaya “menari” mereka sama yakni represif, menahan dan memenjarakan mereka yang menolak kebijakan-kebijakan mereka.

Kebijakan tersebut direspons oleh kalangan aktivis politik Islam dengan menta’ati kebijakan tersebut, karena memang mereka tidak berkutik, sedangkan di lini lain, yakni lini intelektual muda Islam yang berbasis pada aktivis organisasi Islam, yakni HMI Cabang Jakarta dengan diwakili oleh intelektual muda potensial—Nurcholish Madjid dan HMI cabang Yogyakarta—yang diwakili oleh komunitas diskusi Limited Group, keduanya menghimbau para aktivis politik Islam agar tidak lagi mengkhidmatkan diri memperjuangkan Islam lewat jalan politik. Nurcholish Madjid menghimbau dengan jargon Islam Yes, Partai Islam No, sehingga dikenal dengan gagasan desakralisasi partai politik, sedangkan tim Limited Group yang digawangi oleh Ahmad Wahib, Djohan Effendy, menghimbau de-formalisasi Islam.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, tipologi sekularisme Islam dengan mendasarkan diri pada batas minimum kebebasan bertindak institusi agama (Islam) dalam mengatur institusi politik persis sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu *zero tolerations*. Dengan indikator tidak bebasnya partai politik Islam mengatur rumah tangganya sendiri, ruang berpendapat ditutup, kebebasan berafiliasi/berorganisasi terbatas, maka tipe sekularisme Islam dalam periode ini adalah *hard secularism*.

BAB VI.

KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS SEKULARISME

ISLAM DI INDONESIA (1930-1983)

A. Latar Belakang Sekularisme Islam di Indonesia (1930-1983)

Pemikiran sekularisme Islam dimulai semenjak era tahun 1930, tepatnya saat Sukarno menggagas pentingnya mencintai tanah air dan kesediaan mengabdikan diri kepada tanah air. Opini memicu respons keras dari kalangan Islam yang menganggap pendapat tersebut telah menjadikan tanah air tersebut sebagai sesembahan (berhala) baru. Karena respons demikianlah yang menghasilkan respon keras pula di kalangan nasionalis non Islam atau Sukarno menyebutnya sebagai kalangan kebangsaan. Respons keras tersebut berupa sikap Sukarno yang tidak keberatan dianggap sebagai penyembah berhala tanah air. Kemudian direspons balik oleh kalangan Islam bahwa Islam memiliki watak holistik, persatuan hanyalah jalan bukan tujuan, demikian juga kecintaan terhadap tanah air hanyalah sebagai jalan untuk mencapai tujuan sesungguhnya yaitu negara Islam. Lewat Sarekat Islam, Sukarno melihat kekuatan Islam sangatlah besar. Sukarno khawatir dengan besarnya kekuatan Islam, maka banyak pihak yang menginginkan negara ini dibangun dengan dasar-dasar Islam dan itu artinya akan banyak peluang terjadinya keterbelahan sikap, sehingga akan menimbulkan pula keterbelahan sikap dan gerak perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Atas dasar kenyataan tersebut, Sukarno berniat pun dengan produktif membangun wacana sekularisme semakin tinggi. Baik ide-ide tentang pemisahan urusan

agama dan negara, himbauan memahami Islam secara substantif, menulis mengenai keberhasilan Turki dalam memisahkan urusan agama dan politik dan membawa kisah tersebut sebagai pelajaran untuk tidak menjadikan agama terlibat dalam urusan politik karena hanya akan menjadikan agama sebagai alat politik belaka.

Nampaknya wacana tersebut menemukan keberhasilan sehingga melahirkan Pancasila dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun diwarnai dinamika penambahan 7 kata pada sila pertama dan kemudian tidak lama menghapus 7 kata tersebut dan menghapus syarat Islam pada kriteria Presiden Indonesia, wacana sekularisme politik terus menjadi semakin kuat dan konsisten.

Pada periode berikutnya, sesuai dengan kebutuhan negara akan konstitusi politik yang permanen dan mengatur secara menyeluruh urusan-urusan mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diadakanlah pemilu untuk memilih anggota perwakilan rakyat guna menyusun UUD secara permanen, mengingat memang UUD 1945 pada waktu itu disusun mengikuti situasi mendesak (persiapan kemerdekaan). Setelah pemilu 1955 diadakan rakyat yang terpilih sebagai wakil segera menyusun agenda sidang Konstituante dan sidang tersebut berjalan selama 3 tahun lamanya. Pada periode ini sekularisme politik didominasi pemikiran yang berpusat pada usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Usaha mempertahankan Pancasila ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan penyusunan UUD permanen untuk mengatur urusan negara dan bangsa secara menyeluruh, sehingga atas dasar persoalan inilah dapat bagi kalangan Blok

Pancasila sebenarnya tidak perlu ada lagi pembahasan dasar negara, karena pembahasan dasar negara telah selesai dibahas dan disepakati pada sidang BPUPKI. Untuk itu tidak perlu sidang tersebut harus kembali ke belakang, membahas ulang sesuatu yang sudah disepakati dan digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun oleh karena sidang Konstituante merupakan harapan terakhir bagi Blok Pancasila untuk memperjuangkan kembali dasar negara Islam, negara Islam, dan Piagam Jakarta sebagai salah satu sumber hukum, maka sidang yang seharusnya dapat menghasilkan produktivitas bagi masa depan bangsa menjadi ajang debat kusir yang tidak kunjung ditemukan ujung titik temunya. Atas dukungan Angkatan Darat dan ditambah adanya situasi politik dan ekonomi yang krusial, Sukarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Suatu keputusan politik yang berakibat luar biasa besar terhadap kehidupan demokrasi politik di Indonesia.

Setelah dekrit dimulailah era kehidupan baru bagi perpolitikan Indonesia, yang awalnya kehidupan berjalan secara demokratis (demokrasi parlementer) menjelma menjadi kehidupan politik yang otoritarian (demokrasi terpimpin). Dengan demikian, dimulai pula babak baru sekularisme Islam di Indonesia. Sekularisme Islam pada masa ini berubah dari mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berubah menjadi Manipol-USDEK dan Nasakom.

Manipol-USDEK dan Nasakom sebagai bentuk baru sekularisme Islam pada era ini dilatarbelakangi oleh sistem politik demokrasi liberal yang tidak disukai Sukarno, demokrasi parlementer. Sistem politik ini menempatkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara, padahal di sisi lain Sukarno sudah

terbiasa mengambil dan terlibat dalam keputusan-keputusan penting untuk menyelesaikan persoalan politik negara. Sehingga ia pernah mengangkat wacana ajakan mengubur partai-partai.¹ Termasuk juga didorong oleh gerakan sporadis yaitu pemberontakan-pemberontakan dari beberapa daerah dan aneksasi Irian Barat oleh Belanda menuntut kecepatan untuk menanganinya.

Tidak hanya situasi politik yang krusial di atas, tetapi juga didorong oleh situasi ekonomi yang semakin kacau akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan perkapalan (yang sebelumnya milik Belanda) dengan diikuti oleh pengusiran warga Belanda di Indonesia. Perampasan perusahaan asing ini salah satunya disebabkan oleh tindakan Belanda yang berusaha menguasai Irian Barat. Dampak perampasan perusahaan ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi yang mengakibatkan transportasi antar pulau menjadi terputus. Efek multiplier lainnya adalah dengan terputusnya transportasi antar pulau, terputus pula transportasi hasil-hasil perkebunan, dan terputus pula ekspor hasil perkebunan, dan merosotnya ekonomi Indonesia.

Sedangkan di sisi lain, badan Konstituante sibuk membahas dasar negara yang diperdebatkan tanpa diketahui ke mana ujung perdebatan tersebut akan berakhir. Walhasil, dengan dukungan Angkatan Darat, Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang malah membuat sistem politik sejak awal bermula bergeser ke arah kanan (demokrasi parlementer) bergeser ke arah kiri (demokrasi terpimpin) dengan doktrin Manipol-USDEK dan Nasakom yang mendukung ideologi politik kiri, yaitu komunisme.

¹ Herbert Feith dan Lanca Castle, Ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), 62.

Dengan adanya pemberontakan G 30 S/PKI sebagai tanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin, dan terbit pemerintahan baru yaitu pemerintahan Orde Baru yang dalam pengakuannya menganut demokrasi presidensial, namun sebenarnya tidak ubahnya pemerintahan otoritarian demokrasi tepimpinnya Sukarno. Atas dasar masalah-masalah warisan periode pemerintahan tepimpinnya Sukarno-lah, akhirnya sekularisme bergerak menjadi wacana politik baru yang dideterminasi oleh kepentingan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi berhasil, maka sistem politik dijadikan sepenuhnya berada dalam kendali terpusat pada pemerintahan. Sehingga agar mudah dikendalikan, pemerintahan Orde Baru membuka wacana monoloyalitas politik, fusi partai politik, *floating mass*, dan asas tunggal.

B. Kontinuitas Sekularisme Islam Indonesia (1930-1983)

Sekularisme Islam telah dimulai semenjak jauh dari era kemerdekaan yaitu tepatnya pada tahun 1930-an, dimulai dengan penyampaian gagasan Sukarno mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai syarat mencapai kemerdekaan. Untuk membangkitkan perasaan dan semangat patriotisme rakyat Indonesia, Sukarno menyebut keindahan dan kekayaan “ibu Indonesia” yang melahirkan pahlawan-pahlawan seperti Gajah Mada dan tokoh-tokoh lain dari zaman Hindu. Untuk mengangkat jiwa persatuan, Sukarno mengangkat tentang pentingnya cinta kepada tanah air, kesediaan yang tulus dalam membaktikan diri kepada tanah air serta kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan partai yang

konteks saat itu Serikat Islam (SI) pada tahun 1925-1930 menjelma menjadi kekuatan politik umat Islam di negara Hindia Belanda tersebut. Sukarno khawatir bahwa cita-cita Nasional kemerdekaan Indonesia akan terhalangi dengan adanya pandangan yang menginginkan Islam haruslah menjadi landasan dalam mengatur negara. Padahal di sisi lain dalam pengalaman sejarah, agama telah menjadi alat legitimasi bagi putusan politik/negara yang ternyata hanya menguntungkan pada segelintir orang/kelompok/golongan tertentu, sehingga negara diatur oleh agama akan berpeluang melahirkan negara tiran. Untuk itu, sangat beralasan ketika Sukarno menyertakan agumen bahwa bersatunya agama dan negara hanya akan menghalangi demokrasi, karena agama diotorisasi secara penuh oleh tokoh-tokoh agama/ulama.

Ide pemisahan agama dan negara ini akhirnya mendapatkan tentangan keras yang sekali lagi diwakili oleh Natsir. Menurut Natsir, negara membutuhkan agama, demikian sebaliknya agama membutuhkan negara. Negara membutuhkan agama dalam rangka memberikan arah tujuan ke mana negara harus melangkah. Demikian juga agama membutuhkan negara sebagai “kaki dan tangan”, sehingga nilai dan norma umum yang dikandung dalam agama dapat hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kaki dan tangan dari negara berupa tempat di mana nilai-nilai/prinsip norma yang terkandung dalam agama dapat diimplementasikan dalam bentuk undang-undang dan dapat berupa aparatur negara sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang tersebut oleh masyarakat.

Dan pada 5 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada sidang BPUPKI, wacana sekularisme Islam kembali muncul saat agenda sidang BPUPKI yang diketuai Radjiman Wedyoningrat melempar pertanyaan ke peserta sidang, dasar negara apa yang akan kita gunakan saat Indonesia merdeka? Banyak kalangan memberikan pendapatnya, termasuk Sukarno yang menelorkan gagasan Pancasila, dan secara aklamasi peserta sidang menyetujui Pancasila sebagai dasar negara, dan dengan secara otomatis bentuk negara Indonesia adalah negara nasional, atau dalam meminjam istilah Sukarno, negara kebangsaan, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tentu saja lawan dari wacana ini yang berasal dari tokoh utamanya adalah Ki Bagus Hadikusumo, Natsir, Kasman Singodimedjo yang tidak bersepakat atas gagasan sekularisme di atas. Para tokoh tersebut menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam, dan senada dengan dasar negara tersebut, maka bentuk negara Indonesia haruslah negara Islam.

Oleh karena demikian alotnya kalangan Islam tersebut, Sukarno akhirnya menjembatani dengan membentuk kepanitiaan Sembilan yang bertujuan untuk mengakomodasi pendirian tokoh Islam tersebut. Melalui panitia Sembilan tersebut, akhirnya kalangan Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan memodifikasi urutan Pancasila, yaitu sila pertama yang awalnya adalah sila ke-5 menjadi sila ke-1 dengan ditambahi 7 kata yaitu “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Dalam periode sidang BPUPKI ini, juga membahas pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta pasal-pasalanya. Pembukaan UUD 1945 kemudian mencantumkan Pancasila sesuai dengan susunan dan tambahan 7 kata

diindikasikan dengan tingginya angka buta huruf, rendahnya pendidikan, buruknya kondisi ekonomi, lebarnya kesenjangan sosial, dan mentalitas dari para birokrat dan politisi yang cenderung korup dan otoritarian, sistem sepenuhnya demokratis (entah demokrasi parlementer atau pun presidensial) akan menjadi cita-cita yang bersifat utopian. Sebab bagaimana pun demokrasi hanya dapat ditempuh dengan syarat-syarat variabel pendidikan, ekonomi dan politik sebagaimana di atas haruslah memadai, yang ditandai dengan angka melek huruf tinggi (pendidikan tinggi), ekonomi relatif tidak ada masalah, dan jiwa mental politik para birokrat dan politisi bersifat egaliter dan demokratis.

Kegagalan demokrasi parlementer menurut beberapa pakar disebabkan oleh pertentangan antara para tokoh politisi yang cakap memainkan simbol, penggalang solidaritas, seperti Sukarno dan tokoh yang cakap administratif, legal, teknis dan berbahasa asing seperti Hatta.¹⁴ Namun berbeda pula pendapat Benda, menurutnya kegagalan itu karena karakteristik demokrasi tersebut memang asing karena pemimpin politik Indonesia selama ini hanya mengenal sistem patrimonialisme dan otoritarian, sehingga memang demokrasi parlementer tersebut ditakdirkan untuk gagal.¹⁵

Kegagalan di atas ditambahi pula oleh kegagalan sidang Konstituante yang berujung pada perdebatan bipolar dasar negara antara Blok Pancasila dan Islam yang tidak kunjung selesai sehingga memunculkan Dekrit Presiden 1959 dan melahirkan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Namun perlu dicatat sebelum

¹⁴ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University, 1962), 34.

¹⁵ Harry J. Benda, "Democracy in Indonesia: a review", *Journal of Asian Studies*, Vol. 23, No. 3, 1964, 453-454.

Pemilu 1955, sidang Konstituant (1956-1959), dan lahirnya Dekrit Presiden (1959), terdapat peristiwa yang memicu lahirnya protes kalangan tokoh politik muslim pada saat itu dikarenakan pidato kunjungan Presiden Sukarno di Amuntai Kalimantan Selatan yang mayoritas komunitas Muslim (1953). Untuk menghambat Masyumi menang dalam pemilu yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan, Sukarno yang saat itu adalah seorang Presiden memberi pernyataan dukungannya kepada negara nasional, bukan negara Islam, karena jika didirikan atas dasar Islam, maka Indonesia bagian timur tidak akan mau menjadi bagian dari Republik.¹⁶ Pernyataan di atas memicu protes dari kalangan kelompok Islam yang merasa terganggu dan menganggap Sukarno sebagai Presiden telah melampaui posisi konstitusionalnya sebagai seorang pemimpin negara yang membawahi kekuatan politik mana pun. Dengan kata lain sebagai seorang Presiden, Sukarno seharusnya tidak berpihak pada kepentingan/kekuatan politik mana pun.

Sebagian pakar berpendapat akhirnya semenjak peristiwa tersebut, pertentangan dasar negara yang pernah terjadi di sidang BPUPKI pada tahun 1945 muncul kembali pada sidang Konstituante di tahun 1956.¹⁷ Dalam analisis yang sudah disampaikan pada bab III dari disertasi ini, bahwa usaha memperjuangkan Islam sebagai dasar negara penyebabnya bukan pidato Sukarno di atas. Peristiwa pidato di Amuntai tersebut bisa dianggap sebagai pemicu, namun penyebab sesungguhnya adalah keinginan sejak lama Blok Islam untuk memperjuangkan

¹⁶ Antara, 19 Januari 1953 dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1987), 264-265.

¹⁷ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 104.

kembali Islam sebagai dasar negara karena dihapusnya tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Sebagaimana analisis Deliar Noer bahwa kalangan Islam pada waktu akhirnya menerima usulan Hatta untuk menghapus tujuh kata tersebut dengan harapan bahwa konstituen Islam yang pasti mayoritas, dapat menghantarkan mereka menjadi wakil rakyat lewat Pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat (Pemilihan Umum seharusnya diselenggarakan 1946, namun karena suatu sebab situasi revolusi negara akhirnya Pemilu tersebut diselenggarakan 1955), mereka punya kesempatan secara konstitusional menjadikan negara ini negara Islam lewat sidang konstituante yang akan diselenggarakan pasca pemilu nanti. Atas dasar alasan-alasan inilah Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo lama kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta tersebut. Motif lainnya adalah dorongan kewajiban transendental untuk mengimplementasikan dan menerapkan ajaran Islam yang holistik.

Dan ketika hasil pemilu yang menghantarkan mereka sebagai pemenang peserta pemilu kedua setelah PNI. Kembali kedua kubu ini bertemu dalam situasi yang sama, yaitu memperdebatkan dasar negara, Pancasila atautkah Islam. Perdebatan tersebut sangat keras, saling meremehkan, tidak ada yang mau kalah atau pun kompromi, bahwa watak perdebatan tersebut saling mengunggulkan diri dengan pendirian/pandangan masing-masing, dengan begitu otomatis meremehkan pandangan pihak lain, selain itu pandangan masing-masing kubu merupakan perwakilan dari pandangan masing-masing, sehingga dukungan

terhadap opini masing-masing pihak tersebut bersifat mayoritas, mutlak-mutlakan, dan saling bertentangan.

Dalam sidang konstituante, tidak hanya persoalan dasar negara yang diperdebatkan melainkan juga persoalan pemisahan agama dan negara diangkat kembali. Sehingga konsensus yang sudah terbentuk sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945 menjadi mundur ke belakang karena harus membahas ulang topik tersebut. Selain pemisahan agama dan negara, ide negara Islam dan usulan adanya aturan tidak bolehnya berpindah agama juga diajukan oleh Blok Islam, namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh peserta sidang.

Sebagai akibat perdebatan bipolar ideologis tidak ada ujungnya, sampai akhirnya didekrit oleh Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 dengan dukungan Angkatan Darat di belakangnya.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli tersebut, maka gagasan sekularisme Islam beralih dari wacana demokrasi parlementer ke wacana demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin wacana sekularisme mengalami perubahan secara radikal. Wacana sekularisme yang semula didominasi alam pemikiran barat, seperti gagasan negara kebangsaan (nasionalisme), pemisahan agama dan negara, demokrasi parlementer, menjelma menjadi wacana sekularisme yang sepenuhnya didominasi oleh alam pemikiran Timur. Dengan mengangkat Manipol USDEK (Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Wacana sekularisme Timur dapat dengan jelas lewat gagasan Sosialisme, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin merupakan refleksi dari tiruan

negara Komunisme China sebagai akibat dari lahirnya poros Jakarta-Phon Phenh-Peking) dan diawali oleh Rusia sebagai *prototype* ideal dan pertama yang menerapkan sistem pemerintah totaliter ini. Suatu sistem pemerintahan yang merupakan manifestasi alam bawah sadar Sukarno sebagai orang Jawa asli yang berkarakter patrimonialistik, sebagaimana saat ia mendukung penuh partai politik tunggal yang dipimpin oleh Achmad Subardjo-PNI *Staats Partij* pada periode pasca kemerdekaan 1945.

Dengan sendirinya Demokrasi Terpimpin ini dilihat dari sudut pandang cita-cita proklamasi Kemerdekaan yang mendambakan kehidupan rakyat yang berkeadilan Sosial, kebebasan politik, dan seterusnya merupakan suatu hal yang bertolak belakang dan bertentangan dengan cita-cita proklamasi itu sendiri. Namun ironisnya, Sukarno malah menggunakan alasan kembali ke cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk membenarkan Demokrasi Terpimpin-nya ini.

Demokrasi Terpimpin yang diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini, dijelaskan secara rinci oleh Sukarno dengan penjelasan yang di kemudian hari dikenal dengan Manipol-USDEK (Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Selain Manipol-USDEK, Sukarno juga menambahkan doktrin Nasakom yang pernah ia ciptakan di era tahun 1930-an sebagai landasan gerak Front Nasional yang ia buat untuk menyelesaikan revolusi nasional (penumpasan gerakan separatis, pengembalian Irian Barat dan pembangunan semesta nasional).

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini akhirnya berakhir dengan dipicu Gerakan yang dikenal dengan G30 S/PKI dengan dipimpin oleh D.N. Aidit dan

kawan-kawannya. Aksi yang sebenarnya hendak merebutkan kekuasaan tersebut disertai dengan penculikan dan pembunuhan beberapa pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Darat dengan melempar isu ada gerakan Dewan Jenderal yang akan melakukan usaha pengambilalihan kekuasaan. Beberapa jenderal tersebut akhirnya dibunuh, hanya Jenderal Nasution saja yang selamat. Usaha penumpasan G 30S/PKI ini akhirnya mengantarkan Suharto ke puncak kekuasaan pemerintahan Indonesia. Melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Suharto mengambil alih pemerintahan Sukarno secara halus dan rapi, dan menjadi Presiden Ke-2 setelah Sukarno. Sehingga melahirkan pula pemerintahan baru dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang disebut oleh Suharto sebagai pemerintahan Orde Lama, dan pemerintahannya sekarang sebagai pemerintahan Orde Baru.

Melalui pemerintahan Orde Baru inilah kemudian lahir wacana sekularisme Islam yang baru dan sangat beragam pula. Suharto yang notebene merupakan seorang Muslim pula membuka wacana sekularisme Islam melalui berbagai kebijakan politik. Kebijakan politik pertama adalah monoloyalitas aparatur negara, mereka terancam akan diganti posisinya jika masih bergabung dengan anggota partai politik tertentu (PNI, NU, Parmusi, PSII, Perti, dan sebagainya),¹⁸ larangan ini tentu saja menciptakan kontraproduktif bagi partai-partai politik pada umumnya, dan partai Islam pada khususnya karena terjadi penyusutan konstituen dari segmen pegawai negeri dan ABRI. Dukungan terhadap partai politik Islam menjadi semakin menyusut menyusul kebijakan

¹⁸ Kenneth E. Ward, *The 1971 Election in Indonesia: an East Java Case Study* (Clyton: Monash Papers on Southeast Asia No. 2, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1974), 11.

yaitu Islam Yes, Partai Islam No. Gagasan ini berorientasi menghimbau rakyat dan para tokoh intelektual dan politisi Islam di Indonesia agar tidak mengkiplatkan diri memperjuangkan Islam lewat jalur-jalur formal dan orientasi formal, yaitu jalur perjuangan politik lewat partai, dengan orientasi memperjuangkan negara Islam, ideologi Islam, partai Islam, dan seterusnya. Menurut Nurcholish Madjid, perjuangan Islam bisa ditempuh dengan jalan lain yang ia sebut dengan jalur kultural dengan memperjuangkan nilai substansial Islam daripada nilai formal Islam.

Dan terakhir, sebagai akibat perkembangan aktivitas politik Islam radikal seperti Gerakan Warman (1978), Pemboman BCA dan Candi Borobudur (1980), Peristiwa Cicendo (1981), pembajakan pesawat Woyla (1981) memaksa pemerintahan Orde Baru untuk mengambil kebijakan sekular berikutnya yaitu penetapan Pancasila sebagai asas tunggal. Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dituangkan dalam UU No. 8/1985 adalah kebijakan yang mengharuskan seluruh organisasi politik dan organisasi massa menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi mereka. Maka dengan segera gelombang respons penolakan datang silih berganti dari umat Islam. Bagi kalangan organisasi mahasiswa seperti HMI, sebagian merespons menerima, dan sebagian menolak dan pihak yang menolak, memisahkan diri menjadi bagian HMI lain yang kemudian dikenal sebagai HMI MPO. Sedangkan bagi Muhammadiyah dan NU yang awalnya menolak kemudian menerima dengan alasan, antara lain: *pertama*, semenjak Ki Bagus Hadikusumo memandang bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang mengandung pengertian Tauhid maka hal

itu sejalan dengan kehendak UU no. 8/1985 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (ayat 1) dan asas tersebut bermakna sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, menurut NU, ditinjau secara formal persoalan Pancasila dan Islam sebenarnya sudah selesai, jikalau ada perbedaan antara dua belah pihak, hal tersebut dimungkinkan karena tidak terjalin komunikasi dan dialog terbuka antara berbagai pihak. *Ketiga*, dalam pasal 3 UU tersebut, organisasi masih diberikan kebebasan untuk menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan RI. *Keempat*, dalam penjelasan UU No. 8/1983 tersebut bahwa penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan bukan berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin dipancasilakan. Oleh karena itu persoalan dikotomi Pancasila dan Islam seharusnya tidak perlu ada, sehingga yang penting justru persoalan rakyat yang harus dipecahkan dengan cara mewujudkan Pancasila dan agama khususnya Islam dalam praktek hidup pribadi, kemasyarakatan, dan kenegaraan. *Kelima*, UU tersebut tidak mengatur peribadatan yang merupakan wilayah sakral pribadi individu dengan Tuhannya, sebagaimana tokoh Islam Perdana Menteri RI, Mohammad Natsir pernah mengatakan bahwa Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha esa mengatakan tidak bertentangan dengan prinsip Tauhid Islam.

Dalam beberapa periode sejarah panjang kontinuitas sekularisme Islam politik tersebut, dapat diketahui pola kontinuitasnya sebagai berikut: *pertama*, dari kurun waktu 1930-an semenjak Sukarno mencetuskan gagasan mengenai pemisahan agama dan negara, pemikiran tersebut akhirnya mengalami evolusi pada periode pemerintahan politik berikutnya sampai pada pemerintahan era Orde Baru. Gagasan pemisahan agama dan negara, walaupun pada awalnya ditentang oleh berbagai tokoh Islam, seperti Agus Salim, Natsir, Ahmad Hassan, namun pada akhirnya terwujud juga dalam pemerintahan pertama Indonesia pasca Kemerdekaan dengan disepakatinya platform ideologi sekuler, yaitu Pancasila sebagai dasar negara.

Kalau ditilik lebih jauh, gagasan pemisahan agama dan negara Sukarno didasari oleh saran bijaknya agar umat Islam lebih melihat Islam sebagai apinya, semangatnya, yaitu semangat Islam, bukan bungkusnya, agar umat Islam lebih melihat Islam secara substansialnya, dan tidak perlu terjebak pada politik formalisme. Suatu ide yang akhirnya digunakan lagi oleh Nurcholish Madjid kemudian pada tahun 1970-an. Walaupun kedua tokoh ini (Sukarno dan Nurcholish Madjid) mendasarkan gagasannya di atas dengan motif yang berbeda, namun keduanya memiliki ide/usulan yang mirip satu sama lain. Sukarno sendiri dalam mendasarkan gagasannya pada tahun 1930-1940-an, agar umat Islam melihat Islam secara substansi karena dia melihat negara Indonesia sendiri merupakan bangsa yang multikulturalis, sehingga tidak memungkinkan negara dengan ciri-ciri demikian akhirnya menggunakan kerangka ideologi nasional dari perwakilan salah satu agama saja, yaitu Islam. Jelas ini akan melahirkan potensi

perpecahan nasional yang tiada berujung. Berbeda lagi dengan Nurcholish Majid, dalam konteks tahun 1971-an, melihat partai Islam seperti Masyumi tidak memiliki peluang sama sekali dalam merehabilitasi diri, bahkan partai Islam yang ada pada waktu itu (Parmusi-Partai Muslimin Indonesia) diintervensi dengan membongkar pasang pimpinan partai oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu, maka Nurcholish Majid pun menghimbau umat Islam melihat Islam dari sisi substansinya, dan bukan skriptualistiknya. Agar bisa demikian, maka umat Islam tidak perlu terikat memperjuangkan Islam lewat jalur-jalur formal politik, melainkan bisa juga melalui jalur lain, yaitu Islam Kultural. Oleh karena itu ia menggagas desakralisasi partai politik Islam dengan mengangkat jargon Islam Yes, Partai Islam No. Semangat keduanya antara Sukarno dan Nurcholish sama-sama mengharapkan agar umat Islam lebih melihat nilai-nilai universal Islam hidup di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam kehidupan politik.

Kedua, selain gagasan pemisahan agama dan negara dan himbauan agar umat Islam melihat api/subtansi Islam daripada formalisme Islam, kontinuitas juga terjadi pada gagasan Nasakom Sukarno. Gagasan Nasionalisme, Agama dan Komunisme Sukarno yang awalnya diproduksi pada tahun 1931-an akhirnya digunakan lagi pada era pemerintahan Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno sendiri. Walaupun motif awal menggagas Nasakom pada tahun 1920-an tersebut digunakan sebagai alat untuk menghadang imperialisme yang demikian hegemonik pada masa itu, namun kesempatan untuk mengimplementasikan gagasan itu tersebut akhirnya mendapatkan momentumnya pada periode kepemimpinannya di Era Demokrasi Terpimpin. Nasakom pada periode tersebut

menjadikan kekuatan ideologi kiri yaitu PKI mendapatkan posisi emasnya, kedekatannya dengan Sukarno menjadikan ia leluasa melakukan manuver-manuver politik yang hanya dapat diimbangi oleh Angkatan Darat. Nasakom pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin akhirnya dipasangkan dengan gagasan Manipol USDEK (Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Nasakom dalam konteks ke-Indoensia-an (negara dengan ciri umat Islam sebagai umat mayoritas) menjadi gagasan ini absurd karena hanya akan melahirkan komunitas utopia, yaitu komunitas impian/khayalan yang di dalamnya hidup berdampingan dua komunitas yang ideologinya saling berlawanan, yaitu Islam dan Komunisme.

Demikian pula gagasan *single majority party* pada periode pasca kemerdekaan yang digagas Sukarno yang hanya berumur sekian hari, akhirnya kembali terwujud meski dalam bentuk lain, yaitu pemerintahan dengan *single power*, pemerintahan di tangan satu orang, Demokrasi Terpimpin di era tahun 1959-1965. Mengapa Demokrasi Terpimpin bisa dikatakan merupakan bentuk kontinuitas dari gagasan *single majority party* di Era Pasca Kemerdekaan? Dalam gagasan ini dapat dibaca ambisi dan hasrat berkuasa dari Sukarno yang menginginkan dan mendambakan adanya kekuatan politik yang terpusat pada satu organisasi (partai politik) atau berpusat pada satu orang, yaitu pimpinan partai. Cerminan kekuasaan terpusat pada satu organisasi/satu orang akhirnya terulang kembali dan terwujudkan dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Sukarno akhirnya mentahbiskan dirinya sendiri sebagai Presiden Seumur Hidup.

Ketiga, gagasan Pancasila yang awal kali dicetuskan dan diusulkan oleh Sukarno sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945-an akhirnya sepuluh tahun kemudian diusulkan kembali sebagai dasar negara dalam Sidang Konstituante pada tahun 1955-1959-an. Meskipun beberapa anggota Blok Nasionalis menganggap bahwa dasar negara sudah final pada saat diterima dalam Sidang BPUPKI sehingga tidak perlu dibahas ulang, namun keadaan tertentu memaksa mereka untuk perlu memperjuangkan kembali gagasan Pancasila tersebut sebagai dasar negara. Keadaan memaksa tersebut bersumber dari kelompok yang berseberangan dengan mereka, yaitu Blok Islam yang menjadikan sidang Konstituante sebagai momentum mereka untuk memperjuangkan kembali Islam sebagai dasar negara. Sehingga Blok Nasionalis mau tidak mau harus berjuang kembali untuk mempertahankan posisinya yang sejak awal sudah diterima secara nasional sebagai dasar negara. Pergulatan kedua kelompok ini sangat gigih, keras, dan lama sehingga bisa dikatakan separuh perjalanan sidang Konstituante yang dimulai pada tahun 1956-an hingga 1959-an berisi perdebatan bipolar ideologi, yaitu Pancasila atau Islam sebagai dasar negara.

Keempat, pola kontinuitas terjadi pada momentum Demokrasi Terpimpin, saat Sukarno mengajukan konsepsi Manipol USDEK (Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) dan Nasakom dalam rangka mengoreksi penyimpangan demokrasi yang terjadi di Indonesia yang selama ini menggunakan demokrasi ala barat. Argumen yang ia sampaikan adalah ajakan mengoreksi penyimpangan demokrasi di Indonesia

Adapun komunitas epistemik pada periode ini tetap berpusat pada orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Blok Pancasila.

Keempat, pada kurun waktu 1959-1965, sekularisme Islam bergeser menjadi doktrin manipol-USDEK dan Nasakom. Warna sekularisme Islam yang semula berbau nasionalis kebarat-baratan dengan Pancasila yang diwarnai dengan demokrasi parlementer menjadi sekularisme Islam yang berbau nasionalis ketimuran. Warna timur dijumpai dengan adanya doktrin Manipol-USDEK yang berusaha mengembalikan dasar politik Indonesia kembali ke UUD 1945, dengan orientasi politik condong pada Sosialisme dan Demokrasi Terpimpin, ekonomi Indonesia pun berorientasi pada Ekonomi Terpimpin, yang keseluruhannya disesuaikan dengan Kepribadian Indonesia. Sedangkan Nasakom sendiri menjadi platform bagi gerakan front nasional Indonesia dalam rangka revolusi fisik, yakni menumpas gerakan separatis daerah, pembebasan Irian Barat dan pembangunan semesta nasional Indonesia. Komunitas epistemik pada periode ini adalah disebut kalangan pro-revolusi. Bagi mereka yang menolak doktrin manipol-USDEK dan Nasakom digolongkan sebagai kontra-revolusi.

Kelima, setelah demokrasi terpimpin berakhir, sekularisme Islam bergerak ke arah pragmatisme ekonomi, yang mana seluruh gerak dinamika kebijakan pada pemerintahan baru, yakni Orde Baru memprioritaskan pada usaha pemulihan ekonomi sebagai akibat hancurnya ekonomi pada masa pemerintahan sebelumnya. Untuk keperluan tersebut, Orde Baru menciptakan doktrin Trilogi Pembangunan, yakni Pertumbuhan ekonomi, Stabilitas politik yang sehat dan dinamis, pemerataan ekonomi beserta hasil-hasilnya. Sebagai akibat doktrin tersebut, maka

pada usaha untuk mempersempit ruang bagi agama untuk mengatur urusan publik (relasi agama dan negara cenderung bermusuhan).

Sebagaimana dalam pertanyaan terakhir dari disertasi ini, dari hasil studi kontinuitas dan diskontinuitas sekularisme Islam Indonesia dapat dipahami tipologi sekularisme Indonesia, antara lain berdasarkan pada indikator derajat kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam menentukan sikap, memilih dan menolak, dan derajat kebebasan untuk membentuk organisasi/aliansi dalam rangka menggalang dukungan, antara lain: pada periode ke-1, tipe sekularisme ringan (*soft secularism*), hal ini dapat dibuktikan *pertama*, adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sidang BPUPKI, Sukarno sebagai pencetus Pancasila menempatkan sila ini menjadi sila ke-5, namun berkat persuasi kalangan Islam, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama, *kedua*, pengakomodasian kalangan kebangsaan terhadap kepentingan/pendirian kalangan Islam yang menginginkan Islam mengatur kehidupan politik negara ini dengan membentuk panitia Sembilan, sehingga menghasilkan Piagam Jakarta yang terkenal dengan tujuh kata tambahan yang dicantumkan dalam sila pertama tersebut, *ketiga*, penerimaan prinsip ketuhanan dalam bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 2, yang sekarang menjadi pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: ayat 1, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan pada periode Demokrasi Terpimpin, terdapat kebebasan bagi kaum nasionalis Islam untuk memberikan pendapat, menyatakan sikap dan

berorganisasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui sidang Konstituante, para pihak pendukung ideologi Islam memberikan kebebasannya untuk mengusulkan pendapat baik mengenai negara Islam, dasar negara Islam, Islam agama resmi negara, menerima demokrasi tapi dengan kebebasan terbatas, menolak komunisme, dan seterusnya. Kemudian dijumpai memiliki derajat kebebasan untuk menunjukkan sikap untuk menolak komunisme, sekularisme, dan lain-lain. Melalui indikator tersebut maka tipe sekularisme Islam pada periode kedua ini adalah *soft secularism*.

5) Walaupun diakui bahwa banyak umat Islam tidak mengakui doktrin Nasakom Sukarno pada era pemerintahan Demokrasi Terpimpin, namun harus diakui ditinjau dari indikator pengakomodasian agama dalam mengatur urusan publik melalui indikator tidak adanya kebebasan berpendapat, menyatakan sikap dan membentuk aliansi/kelompok dalam meraih dukungan untuk berposisi dengan pemerintah maka tipe sekularisme dalam periode ini dapat dikatakan *hard secularism*.

6) Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemberian ruang terhadap agama dalam mengatur urusan agama menjadi lebih sempit/terbatas dibandingkan periode-periode pemerintahan sebelumnya, Orde Baru tidak menginginkan menghidupkan kembali Masyumi sebagaimana keinginan para tokoh Islam, namun Orde Baru menginginkan agar umat Islam mendirikan partai baru yang kemudian dikenal dengan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) dengan format kepemimpinan yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka yang semula menginginkan pucuk pimpinan dipegang oleh mantan pemimpin Islam yang

berpengaruh yakni Muhammad Roem, namun pemerintah Orde Baru menginginkan sosok Islam lain, yang tidak dikenal yaitu Djarnawi Hardikusumo.

Berikutnya, dengan kepentingan memprioritaskan pembangunan ekonomi, maka variabel politik sejauh mungkin dikendalikan salah satunya dengan mengambil kebijakan depolitisasi dan deparpolisasi politik Islam. Lewat beberapa kebijakan antara lain: a) monoloyalitas politik para aparatur sipil negara dan ABRI hanya pada satu kekuatan politik yaitu Golkar menyebabkan merosotnya dukungan terhadap partai Islam dari masyarakat segmen PNS dan ABRI, b) fusi partai politik, yaitu peleburan partai-partai politik Islam (Parmusi, NU, PSII, Perti) menjadi satu partai Islam (PPP) memungkinkan pemerintah mudah mengendalikan partai ini, c) intervensi pemilihan dan pergantian ketua partai, d) *floating mass* (massa mengambang) yang mengatur perwakilan partai tidak boleh sampai tingkat desa, kelurahan, kecamatan menjadikan sekularisme pada tipe ini adalah sekularisme yang bercirikan agama dan negara cenderung relatif bermusuhan (*hard secularism*).

diri pada tanah air, pemisahan agama dan negara, himbuan memahami Islam dari substansinya, Pancasila sebagai dasar negara dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, kriteria Presiden tidak harus Islam, penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Periode 1945-1959, sekularisme Islam berpusat pada usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, menolak Islam sebagai agama resmi negara. Periode 1959-1965, sekularisme Islam pada Demokrasi Terpimpin terpusat pada doktrin Manipol-USDEK dan Nasakom. Walaupun dasar negara dan ideologi negara yang diakui adalah Pancasila, praktek Nasakom dengan dominan Komunisme. Sedangkan periode 1965-1983, wacana sekularisme berpusat pada tema: desakralisasi partai politik (Islam) atau de-Islamisasi partai politik. Pada periode ke-3 dan 4, ini, wacana sekularisme Islam mengalami diskontinuitas (keterputusan). Kesimpulannya, pada keseluruhan periode tersebut terdapat diskursus sekularisme Islam mengalami kontinuitas yang diakronik, yakni senantiasa konsisten Pancasila sebagai dasar dan ideologi sekular Indonesia, namun terdapat juga diskontinuitas yang sinkronik dimana masing-masing periode memiliki sub tema sekularisme Islam yang berbeda-beda.

3. Periode 1930-1945 dan periode 1945-1959, berdasarkan pada derajat kebebasan institusi (kelompok) Islam dalam mengatur institusi politik, bahwa tipologi sekularisme Islam pada periode ini adalah *soft secularism*. Sedangkan pada periode 1959-1965 dan periode 1965-1983, wacana berlangsung satu arah, yakni didominasi oleh pemerintah dan kekuatan

lewat kepemimpinan tunggal Sukarno dan Suharto. Sehingga relasi kuasa dan pengetahuan berjalan secara asimetris, satu arah, tidak setara, satu pihak (negara) dominan dan pihak lainnya (kelompok Islam) subordinan yakni lewat berbagai kebijakan yang diambil secara terpusat.

3) Implikasi pada teori komunitas epistemik. Disertasi ini menemukan bahwa masing-masing komunitas epistemik sekularisme Islam memiliki *mind set* yang berbeda-beda dalam memandang persoalan politik Indonesia dan solusinya. Pada periode pertama, *mind set* didasarkan pada keharusan mencintai tanah air dan mengabdikan diri pada tanah air (nasionalisme). Sedangkan periode kedua (1945-1959), komunitas epistemik yang muncul adalah *mind set* mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara (Pancasilaisme atau Pancasila *minded*), kemudian pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) memandang untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan, negara perlu kembali ke jalan revolusi (revolusionisme) dan persatuan 3 ideologi yaitu Nasakom (Nasakomisme). Kemudian berlanjut pada periode Orde Baru, Indonesia bisa keluar dari keterpurukan ekonomi hanya dilalui dengan pembangunan ekonomi (pembangunanisme). Pada 2 periode, yakni periode 1930-1945, komunitas epistemik nasionalisme dialektika dengan komunitas epistemik Islamisme, demikian juga komunitas epistemik periode 1945-1959, Pancasilaisme vs Islamisme, namun dua periode sesudahnya (Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) komunitas epistemik Nasakomisme atau Nasakom *minded* dan pembangunanisme berjalan tanpa lawan.

5) Implikasi teoritis pada tipologi sekularisme. Dari masing-masing periode sekularisme, berdasarkan teori toleransi kembar Alfred Stepan, batas kebebasan minimum institusi agama bertindak mengatur institusi politik tiap periode berbeda-beda. Sekularisme Islam dari periode pertama (1930-1945) mengindikasikan bahwa relasi kaum nasionalis agama dan kaum nasionalis sekuler relatif bersahabat. Kalangan Islam mendapat ruang untuk memengaruhi konstitusi politik agar sesuai dengan cita-cita mereka tentang negara yang ideal, yaitu negara Islam, dasar negara Islam, kriteria pemimpin Indonesia dari kalangan Islam, serta penerapan syariat Islam. Walaupun perjuangan kaum nasionalis agama berakhir pada kegagalan, tipe sekularisme ini cenderung pada *soft secularism*

Pun demikian pada periode kedua (pada tahun 1956-1959), usaha keras kalangan nasionalis Islam pada periode pertama diulang kembali di antaranya dasar negara haruslah Islam, bentuk negara yang baik adalah negara Islam, serta berusaha memasukkan agama Islam sebagai agama resmi negara, namun berakhir juga pada kegagalan. Sehingga pada periode ini tipe sekularisme *soft secularism* cenderung mengarah pada *hard secularism* (negara memusuhi agama)

Sedangkan pada periode ke-3, tipologi sekularisme Islam berubah menjadi *hard secularism* yang diindikasikan negara menolak sama sekali intervensi kaum agama (yang diwakili oleh Masyumi) dalam politik, bahkan partai politik ini pun dibubarkan. Walaupun ada unsur agama dalam Nasakom yang diwakili oleh NU, tapi kedudukan NU pada unsur pemerintahan tersebut bersifat formal belaka.

Setali tiga uang dengan Sukarno, Suharto pun melakukan deparpolisasi partai politik Islam atau meminjam istilah Rusli Karim, de-Islamisasi politik, ia

pun memaksakan penyederhanaan partai, monoloyalitas ABRI dan aparat sipil negara, membatasi keterjangkauan partai politik terhadap konstituennya (*floating mass*), Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal menunjukkan relasi bermusuhan antara agama dan negara, sehingga pada periode ini disebut bertipe *hard secularism*.

Dengan mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka tesis Nader Hashemi mengenai tipologi sekularisme Islam Indonesia yang bertipe *soft secularism* ditolak. Pada periode tertentu (periode 1959-1965 dan 1965-1983), relasi negara kurang bersahabat, sehingga tidak terbukti pada dua periode terakhir. Tesis Hashemi yang mendasarkan diri pada pembacaan sekularisme Islam satu kurun waktu saja (yakni masa Orde Baru) dan pembacaannya hanya bertolak pada respon kalangan cendekiawan semata (Nurcholish Madjid dan cendekiawan muslim lainnya), menurut hemat penulis, pembacaan sekularismenya kurang komprehensif dan simplifistis.

C. Keterbatasan Studi

Hasil studi ini menyisakan beberapa keterbatasan, antara lain: *pertama*, ia membatasi fokus kajian sekularisme Islam di Indonesia hanya pada tahun 1930-1983, yaitu sepanjang 53 tahun. Padahal kajian mengenai sekularisme Islam tidak hanya terbatas pada tahun 1983, melainkan bisa dikaji sampai rentang yang lebih panjang lagi yaitu masa reformasi. Sehingga untuk kepentingan jangka panjang mengenai studi sekularisme Islam di Indonesia dapat dilanjutkan lewat studi berikutnya.

Kedua, oleh karena rentang cukup panjang, maka tantangannya ada pada data. Beberapa data pada beberapa variabel bisa diperoleh merupakan data primer, seperti risalah sidang BPUPKI dan PPKI, risalah sidang konstituante, namun pada periode sebelumnya (1930-1940), penulis hanya bersumber pada data sekunder. Sebagian besar data primer yang memuat pemikiran-pemikiran sekularisme Islam diterbitkan dalam berbagai media massa pada tahun-tahun tersebut yang tidak terjangkau oleh penulis. Hal ini memberikan hambatan pada pemahaman secara utuh atas peristiwa yang terjadi pada masa itu, padahal peristiwa tersebut menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut.

Ketiga, demikian juga karena rentang studi disertasi ini cukup panjang, maka analisis pada masing-masing periode tidak merata baik dari sisi kedalaman, kerapatan analisis masing-masing variabel dan hubungan antar variabel, keterbatasan dalam memetakan asumsi dasar masalah, termasuk longgarnya dalam menyusun sintesis pada bagian proposisi masing-masing bab.

D. Rekomendasi

Oleh karena keterbatasan studi di atas, maka rekomendasi atas studi ini adalah penelitian mengenai kontinuitas dan diskontinuitas sekularisme Islam perlu dilanjutkan pada periode berikutnya yaitu periode 1983 sampai periode reformasi. Dengan dilanjutkannya studi sekularisme Islam pada periode berikutnya, harapannya dapat melahirkan pemahaman lebih utuh mengenai konsepsi integrasi politik yang kompatibel bagi bangsa Indonesia yang berwatak plural, majemuk dan multikultural.

- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.
- Bourchier, David., Vedi R. Hafidz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006.
- Burns, Peter., *Revelation and Revolution: Natsir and the Pancasila*, Townsville: Southeast Asian Monograph Series No. 9, Committee of South-East Asian Studies, James Cook University of North Queensland, 1981.
- Chalid, Idham., *Islam dan Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Lembaga Penggali dan Penyebar Api Islam-Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia, Endang dan Pemuda, 1965.
- Cox, Harvey., *The Secular City*. New York: The Macmillan Company, 1966
- Crouch, Harold., *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1978.
- Crouch, Harold., *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Dahm, Bernhard. *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1969.
- “Merelevansikan bukannya Menghilangkan Salam,” *Amanah*, No. 22, 8-21 Mei 1987.
- Duta masyarakat, 25 Agustus 1959.
- Duta Masyarakat, 4 Januari 1961.
- Duta Masyarakat, 10 Januari 1961.
- Duta Masyarakat, 13 Oktober 1962.
- Duta Masyarakat, 21 Mei 1963.
- Duta Masyarakat, 22 Mei 1963.
- Duta Masyarakat, 31 Januari 1966.
- Duta Masyarakat, 16 Maret 1966
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

- Effendy, Bahtiar., "The 'Nine Stars' and Politics: A Study of the Nadhlatul Ulama's Acceptance of Asas Tunggal and Its Withdrawal From Politics," *Tesis Master*, Ohio University, 1998
- Effendi, Djohan., "Pluralisme Pemikiran dalam Islam," Makalah tidak diterbitkan. Agustus 1987.
- Effendi, Djohan., "Persekusi ataukah Persuasi," Makalah tidak diterbitkan, Februari 1986.
- Effendi, Djohan., Ismed Natsir. Ed., *Pergolakan Pemikiran Islam Disertai Komentar Pro dan Kontra: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
- Ernas, Saidin., "Artikulasi Ideologi Politik Masyarakat Islam Di Indonesia," *al-Adalah*, Volume 17 Nomor 2 November 2014.
- Federspiel, Howard., *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth century Indonesia.*, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1970.
- Federspiel, Howard M., *Muslim Intellectuals and National Development*, New York: Nova Science Publishers Inc., 1991.
- Feith, Herbert., *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (London: Equinox Publishing, 2006.
- Feith, Herbert., *The Indonesian Elections of 1955*, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971.
- Feith, Herbert., "Dynamics of Guided Democracy," Ruth McVey (ed.), *Indonesia, New Haven*: Southeast Asia Sindies, Yale University, by arrangement with Human Relations Area Files Press, 1963.
- Feith, Herbert., Lance Castle, ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Fairclough, *Discourse and Social Change*. Cambridge: Poliiity Press, 1999.
- Foucault, Michel., "Genealogy and Social Criticism" dalam *The Post-Modern Turn: New Perspective on Social Theory*, ed.S. Seidman, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

- Foucault, Michel., "Nietzche, Genealogy, History" dalam *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*, ed. L. Cahoon. Cambridge: Blackwell Publisher, 1996
- Foucault, Michel. *The Archeology of Knowledge*, terj. A.M. Sheridan-Smith, London: Tavistok Publication, 1972.
- Foucault, Michel. [*The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*](#) London: Routledge, 2002.
- Foucault, Michel.. *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, terj. C. Gordon et al., Pantheon Random House, New York, 1980.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, Terj. Sheridan New York: Random House, 1979.
- Foucault, Michel., *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction*, Terj. Robert Hurley London: Penguin, 1976.
- Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*. New York Fordham University Press, 1946.
- Habermas, Jurgen, "The Public Sphere" dalam *Readings in Contemporary Political Sociology*, ed. K.Nash, Blacwell Publishers, Oxford, 2000.
- Hashemi, Nader., *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 2011.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Harun, Saleh., Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Yogyakarta: Aquarius, 1987.
- Hatta, Mohammad., *Sekitar Proklamasi*, Jakarta: Tintamas, 1969.
- Hilmy, Masdar., "Memperkuat Islam Kebangsaan," *Kompas*, 11 September 2017.
- Hooker, M.B., (ed), *Islam in Southeast Asia*, Leiden: E.J. Brill, 1983.
- Jenkins, David. *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*, Ithaca: Monograph Series, Publication No. 64, Cornell Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1984.
- Jones, Howard Palfrey., *Indonesia: The Possible Dream*, Singapore/Jakarta: Gunung Agung, 1980.

- Joseph, Jonathan., *Social Theory: Conflict, Cohesion and Consent*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
- Kamal Hassan, Muhammad., *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982.
- Kahin, George Mc T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1952.
- Kartodirdjo, Sartono., *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, I-VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Karim, M. Rusli, *Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Kuru, Ahmet., "Passive and Assertive Secularisme: Historical Condition, Ideological Struggles and State Policies toward Religion," *World Politic* 59, Juli 2007.
- Kuru, Ahmet., *Secularism and State Policies toward Religion: The United States, Frances, and Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009), Montreal Review, Februari 2012.
- R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Lihat catatan kaki No. 42. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kutoyo, Sutrisno., *Prof. H. Muhammad Yamin S.H.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1986.
- Latif, Yudi., *Dialektika Islam Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Bandung: Jalasutra, 2007.
- Lee, Oey Hong. *Indonesia Government and Press During Guide Democracy*. Hull: Centre for Souteast Asian studies, The University of Hull, 1971.
- Lev., Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institution*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972.
- Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.

- Ma'arif, Syafi'i., *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madjid, Nurcholish., et. al., *Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: Islamic Research Center, 1970.
- Madjid, Nurcholish., "Nurcholish yang Menarik Gerbong," *Tempo*, 14 Juni 1986.
- Madjid, Nurcholish., *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish, "Islamic Traditional and The Problems of Modernization " *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, Berkeley and Los Angeles: California University press 1991.
- Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge, 1991.
- Mahmuddin, "Formalisme Agama Dalam Perspektif Gerakan Sosial: Prospek Dan Tantangan Di Masa Depan" *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015.
- Malik dan Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*. Bandung: Zaman Wacana Muda, 1998.
- Marquand, David., dan Ronald Nettle, ed. *Religion and Democracy*. Oxford: Blackwell, 2000
- McVey, Ruth., [*Faith as the outsider: Islam in Indonesian Politics In: "Islam in the political process"*](#), Cambridge: University Press 1984.
- Merdeka. Com. Soepomo-Kisah Soepomo-Ahli Hukum sekaligus Menteri Kehakiman Pertama, <https://m.merdeka.com>, sedangkan ia seorang penganut Teosofi dari R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3, California: SAGE Publication, 2014. *Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague and Bandung; W. Van Hoeve Ltd., 1958.
- Mills, Sara., *Discourse*. London: Routledge, 1999.

- Mortimer, Rex., *Indonesia Communism under Soekarno: Ideology and Politics*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.
- Murtopo, Ali., *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1973.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation, 1995.
- Nasution, Harun., "Islam dan System Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah," *Nuansa*, Desember 1984.
- Nasution, Harun., *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1984.
- Nasution, Harun., *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Nasution, Harun., "Menanyakan kembali Pemikiran Islam," *Tempo*, 22 September 1990
- Natsir, Mohammad., *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Natsir, Mohammad. *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and Intertainment affairs*. Sebuah cerammah yang disampaikan di depan the Pakistan Institute of World Affairs, Cornell University, Ithaca, 1954.
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, Oxford, New York and Jakarta: Oxford University Press, 1978.
- Noer, Deliar., *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Nishihara, Masashi., *Golkar and the Indonesian Election of 1971*, New York: Modern Indonesia Project Cornell University, 1972
- Parekh, Bikhu., *Rethinking Multiculturalism: Cultural, Diversity and Political Theory*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2000.
- Poespowardojo, Soerjanto., *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis* Jakarta: Gramedia, 1989.

- Poesponegoro Marwati Djoened., Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka: 1984.
- Pranarka, A.M.W.. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1985.
- Porta, Della., Diani, *Social Movement: An Introduction*. Oxford: Balacwell Publisher, 1999.
- Rahardjo, M. Dawam., “Tujuan Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia,” *Panji Masyarakat*, No. 85, Agustus 1971.
- Rasjidi, H.M., *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Reindhart, John M., *Foreign Policy and National Integration: The Case of Indonesia*, New Haven, Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, 1971.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Robinson, Richard., *Indonesia: The Rise Capital*. London: Macmillan Internasional College Edition, 1986.
- Santoso, Listiyono., “Agama dan Negara Tinjauan Hermeneutika atas Konsep Sekularisasi Politik Menurut KH. Abdurrahman Wahid.” *Tesis*. Yogyakarta: UGM, 2003.
- Samson, Allan., “Islam and Politics in Indonesia,” Allan Samson, *Asian Survey*, Vol. 8, No. 12 (Dec., 1968), 1001-1017.
- Sekretariat Negara, 30 Tahun Indonesia Merdeka.
- Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Edisi IV. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998.
- Sukiman, “Kritik atas Ontwerp Ir. Sukarno”, *Mustika*, 3 Oktober 1932.
- Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947-1977*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Soeharto, *Amanat Kenegaraan IV 1982-1985*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. 1, Jakarta: Panitia Penerbitan Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.

- Tempo wawancara dengan Abdurrahman Wahid, “Salahkah Jika Dipribumikan?”
Tempo, 16 Juli 1991.
- Teeuw, A., *Modern Indonesia Literature*, Vol. II. Martinus Nijhof: The Haque, 1979.
- The Indonesia Spectator, No. 3, 1959.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia, zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, Edisi Pemutakhiran (1900 – 1942)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- van Dijk, C., *Rebellion under the Banner of Islam*, Martinus Nijhoff: The Haque, 1981.
- van Niel, Robert., *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague W. Van Hoeve, Ltd. 1960.
- van Niel, Robert., *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009.
- von der Mehden, Fred R., “Islam and the Rise of Nationalism in Indonesia”, Madison, University of Wisconsin Press, 1963.
- Wahid, Abdurrahman., “Salahkah Jika Dipribumikan?” *Tempo*, 16 Juli 1991, 19.
- Wahid, Abdurrahman., Lukman Harun, Moeslim Abdurrahman, “Mulai Ditinggalkan Aspirasi Umat Islam lewat Kelembagaan Formal,” *Kompas*, 22 Oktober 1986.
- Wahid, Abdurrahman., “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa,” *Prisma*, edisi ekstra, 1984.
- Wahib, Ahmad., *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Ward, Kenneth E., *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, Ithaca: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1970.
- Ward, Kenneth E., *The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study*, Monash Papers on Southeast Asia, Monash Centre of Southeast Asian Studies, Melbourne, 1974.

4.	Peta Dinamika Pemikiran Dakwah Islam antara Klasik dan Kontemporer	Buku ISBN: 9786023 320721, Penerbit UIN Sunan Ampel Press	2017
5	Transformasi Peran Ulama Indonesia pada Era Indonesia Modern dari Orde Baru ke Orde Reformasi	Jurnal Tadrisuna (STAI Raden Rahmat Gresik) Vol. I, No. 1, Maret 2018, ISSN cetak: 2615-8477, ISSN Online: 2620-3057	2018
6	Transformasi Pemikiran Muhammadiyah dari Islam Modernis ke Islam Konservatif Periode 1995-2015 (Perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Manheimm)	Jurnal Tadrisuna Vo. 2, No. 1 (2019), Maret 2019, e-ISSN 2620-3057	2019
7	Model Intervensi Komunitas Rifka Annisa terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yogyakarta	Jurnal Inteleksia, Vol. 2, No. 1 (2020), Januari 2020, ISSN. 2686 – 3367, e-ISSN: 2686-1178	2020
9	Pengembangan Komunitas Lokal Sektor Ekonomi pada Desa Nglanggeran Yogyakarta	Jurnal Inteleksia Vol. 02, No. 01, ISSN. 2686 – 3367, e-ISSN: 2686-1178	2020
10.	Produksi Hiperrealitas pada Komunitas Utopia di Indonesia	Jurnal Tadrisuna, Volume 3, No. 2, September 2020, ISSN: 2615-8477, e-ISSN: 2620-3057	2020
11.	Developing Halal Village Tourism Through Asset Community In Setanggor, Lombok Tengah"	Jurnal At Turas Volume I, No. 8, Januari-Juni 2021, P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063	2021

